



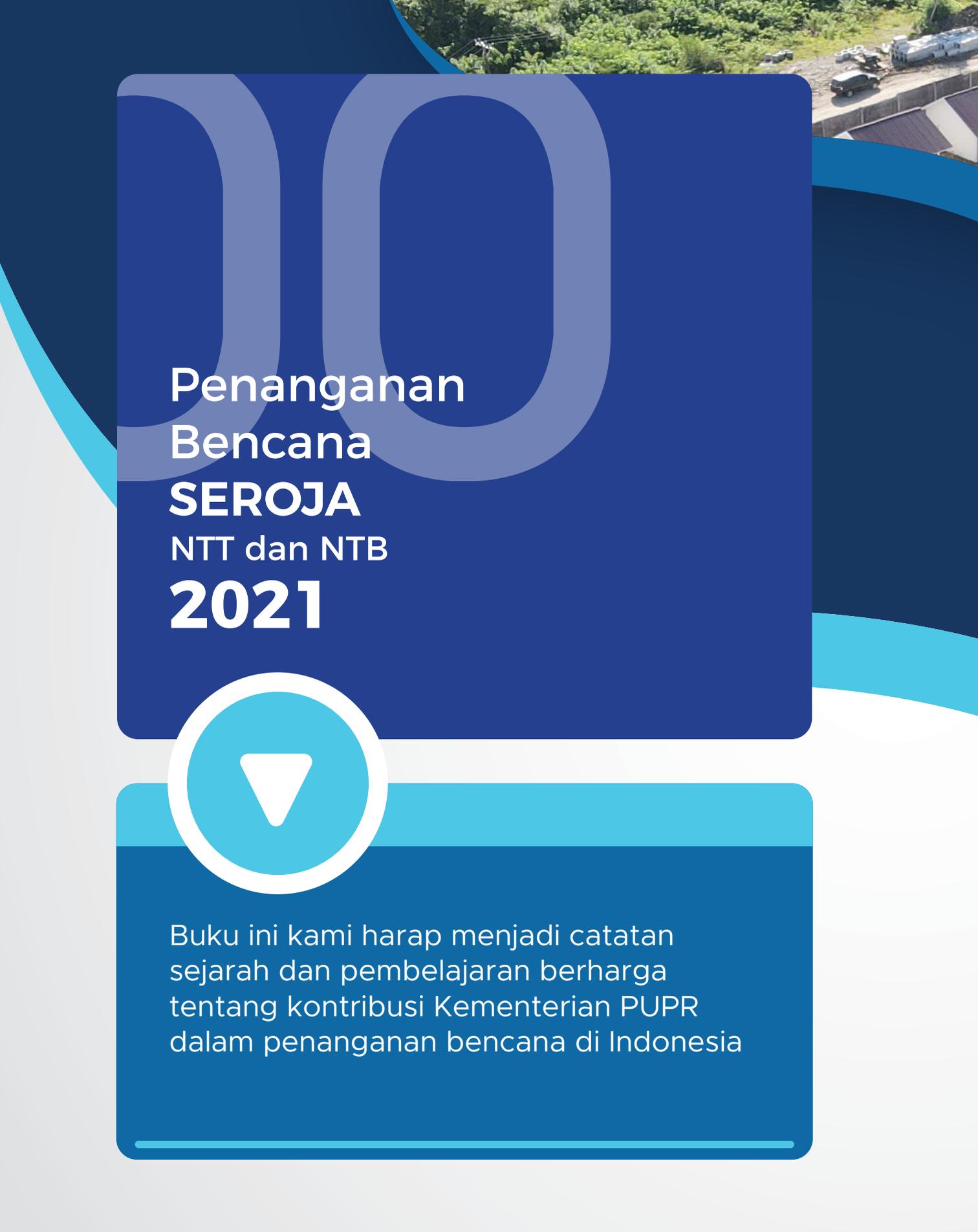
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

# Penanganan Bencana **SEROJA** NTT dan NTB **2021**

Bangkitlah,  
Nusa Tenggara!

[pu.go.id](http://pu.go.id)





# Penanganan Bencana **SEROJA** NTT dan NTB **2021**



Buku ini kami harap menjadi catatan sejarah dan pembelajaran berharga tentang kontribusi Kementerian PUPR dalam penanganan bencana di Indonesia



# Penanganan Bencana **SEROJA** NTT dan NTB **2021**

## **Pengarah**

Widiarto  
Nazib Faizal

## **Tim Penulis**

Widiarto  
Komang Sri Hartini  
Setia Dewi Prihapsari  
Gama Ilmy Hartanto  
Mayta Utari  
Ahmad Shohibuz Zakky Rosadi  
Naufal Azaki  
Rozi Abrori Fathurochim  
Nita Fikhriani Azhari  
Shinta Afwa Nisaa  
Bintang Adi Pratama  
Muhammad Agra Ramadhani  
Rinaldi  
Mohamad Ikhsan  
Solihin Syafril

## **Tata Letak**

Siti Nurdini

Oktober, 2024

## **Pemegang Hak Cipta**

Pusat Data dan Teknologi Informasi

## **Diterbitkan Oleh**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Pusat Data dan Teknologi Informasi  
JI Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

## **Informasi lebih lanjut**

[pusdatin@pu.go.id](mailto:pusdatin@pu.go.id)



# SEKAPUR SIRIH

**Menteri  
Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat**

Indonesia merupakan daerah rawan bencana karena merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di khatulistiwa diantara samudera pasifik dan hindia, dan di Lingkaran Api Pasifik (Pacific Ring of Fire), yang mengakibatkan sering terdampak oleh bencana alam maupun perubahan cuaca (climate change), sehingga Indonesia sering disebut sebagai Supermall bencana karena segala jenis bencana ada dan sering terjadi antara lain bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, dan bencana hidrometreologi.

Frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022. Oleh sebab itu, tanggap, siaga dan waspada menjadi kunci, baik masa prabencana, pada masa tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan dan dikelola dengan baik.

Dalamrangkamitigasi dan pengurangan risiko bencana, Kementerian PUPR berupaya melakukan pembangunan infrastruktur tangguh bencana yang siap mengadopsi kondisi bencana dengan terus mengembangkan inovasi dan teknologi, termasuk perbaikan tata kelola penanganan bencana.



Penanganan Infrastruktur Terdampak Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 atau yang lebih dikenal dengan Bencana Akibat Badai Siklon Tropis Seroja, yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat patut diapresiasi karena telah dikoordinir, diorganisir, direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik sejak awal masa tanggap darurat hingga masa transisi pemulihan. Disamping itu seluruh infrastruktur PUPR yang terdampak telah dipulihkan dengan cepat secara permanen kondisi dan fungsinya sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah.

Saya menyambut baik penulisan buku ini karena dalam penanganan Bencana Akibat Badai Siklon Tropis Seroja di Provinsi NTT dan Provinsi NTB banyak hal yang dapat dipetik sebagai pembelajaran bagi generasi muda insan PUPR untuk pelaksanaan tugas ke depan, antara lain penerapan prinsip negara hadir, Build Back Better, mission-oriented (datang pertama pulang belakangan setelah tuntas), koordinasi dan sinergi dengan para pihak (masyarakat, Kementerian/Lembaga lain, dan Pemerintah Daerah), serta tetap mengadopsi kearifan lokal. Semoga apa yang telah dibangun oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR dapat dirasakan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat serta membawa kepada tatanan kehidupan yang lebih baik dan menjadikan masyarakat yang lebih bermartabat.

**Bencana alam  
Siklon Tropis Seroja  
menjadi tantangan  
tersendiri karena  
merupakan bencana  
yang dampaknya cukup  
masif**

**M. Basuki Hadimuljono**

Menteri Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat

# KATA PENGANTAR

## Kasatgas Penanganan Bencana NTT-NTB Tahun 2021

**B**uku ini pada dasarnya merupakan catatan dan dokumentasi kegiatan Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT & Provinsi NTB Tahun 2021 selama melaksanakan penanganan bencana akibat Badai Seroja di Provinsi NTT dan Provinsi NTB pada tahun 2021 selama kurang lebih 2 tahun, banyak pelajaran yang dapat dipetik antara lain:

1. Lokasi infrastruktur terdampak bencana bersifat masif dan tersebar di 2 provinsi meliputi 16 kabupaten/kota dengan total  $\pm$  563 kegiatan/lokasi, yaitu Provinsi NTT (13 Kabupaten/Kota sebanyak  $\pm$  525 Kegiatan/Lokasi) dan Provinsi NTB (3 Kabupaten/kota sebanyak  $\pm$  38 Kegiatan/Lokasi);
2. Karakteristik lokasi penanganan bencana bersifat kepulauan dan pada umumnya terisolir dipelosok yang sulit dijangkau;
3. Adanya pembatasan mobilisasi akibat pandemi Covid-19;
4. Kerusakan infrastruktur meliputi berbagai sektor (infrastruktur Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan);
5. Manajemen rantai pasok sumber daya (tenaga kerja, material, peralatan) yang bersifat masif dari sisi waktu, jumlah, dan kualitas;



6. Masih terdapat celah payung hukum antara aturan pelaksanaan PBJ dengan ketentuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Kondisi dan tantangan tugas tersebut dapat dilalui bersama dengan militansi dan kekompakan seluruh tim Satuan Tugas; koordinasi dan sinergi dengan para pihak (masyarakat, Kementerian/Lembaga lain, dan Pemerintah Daerah); serta inovasi teknis maupun tata kelola dalam penanganan bencana.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan Kementerian, Balai, Satker dan PPK beserta Jajarannya di lingkungan Kementerian PUPR yang telah memberikan dukungan maupun berkontribusi secara langsung bahu-membahu dengan semangat juang dalam menyelesaikan seluruh tantangan tugas sampai dengan tuntas.

Semoga catatan dan dokumentasi yang dituangkan dalam buku ini dapat berguna sebagai pembelajaran bagi generasi muda insan PUPR dalam pelaksanaan tugas ke depan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua, dan seluruh bangsa Indonesia.

## catatan dan dokumentasi kegiatan Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT & Provinsi NTB Tahun 2021

**Ir. Widiarto, SP-1**

Ketua Satuan Tugas Pelaksana  
Penanggulangan Bencana NTT dan NTB

---

# DAFTAR ISI

---

Penanganan Bencana SEROJA  
NTT dan NTB 2021

**06**

**Sekapur Sirih**

Kata Sambutan  
Menteri PUPR  
**07**

**08**

**Kata Pengantar**

Kata Sambutan  
Ketua Satuan  
Tugas Pelaksana  
Penanggulangan  
Bencana NTT dan NTB  
**09**

**10**

**Daftar Isi**

# 12

**BAB 1**

**Kebijakan Penyelenggaraan  
Penanggulangan Bencana  
Kementerian PUPR**

# 22

**BAB 2**

**Sekilas Bencana Badai  
Seroja**

# 28

**BAB 3**

**Pelaksanaan Manajemen/  
Tata Kelola Penanganan  
Bencana**

# 34

**BAB 4**

**Gerak Cepat:  
Penanganan Masa  
Tanggap Darurat**

# 44

**BAB 5**

**Penanganan Masa Transisi:  
Mempercepat Pemulihan  
Kondisi dan Fungsi**

# 60

**BAB 6**

**Good Governance:  
Ketentuan dan Pelaksanaan  
Pengadaan Barang/Jasa  
dan Anggaran Penanganan  
Bencana**

# 74

**BAB 7**

**Good Delivery: Peran  
Pendampingan dan Audit**

# 80

**BAB 8**

**“Catatan Lain yang  
Menjadi Perhatian”  
(Pembelajaran dari Bumi  
Nusa Tenggara)**

# 92

**LAMPIRAN**

# 01



**Kebijakan Penyelenggaraan  
Penanggulangan Bencana  
Kementerian PUPR**

- 
- Komando Penanggulangan Bencana
  - SK Satgas Penanggulangan Bencana Provinsi NTT dan NTB

# BAB 1

## Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR

### A Komando Penanggulangan Bencana

Secara geologis, wilayah Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia, yaitu: lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Hal tersebut membawa manfaat sekaligus kerentanan bagi Indonesia. Manfaat yang dirasakan antara lain tanah yang menjadi subur alami, memiliki berbagai jenis mineral tambang, serta terbentuknya potensi energi panas bumi. Pada sisi lain, letak geologis tersebut menyebabkan wilayah Indonesia rentan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Selain itu, Indonesia juga sering mengalami bencana hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh perubahan iklim yang mengakibatkan kondisi cuaca ekstrem, La-Nina dan El-Nino, banjir, gelombang pasang, puting beliung, dan kekeringan yang memicu dampak lain seperti tanah longsor dan kebakaran hutan/lahan.

Memperhatikan kondisi tersebut, Kementerian PUPR sebagai instansi yang mendapat mandat dalam hal pembangunan infrastruktur bidang PUPR memiliki kebijakan dalam pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana (disaster-resilient) melalui berbagai regulasi yang memperhitungkan faktor keamanan terhadap risiko bencana.

Di samping itu, dalam rangka tanggap menghadapi bencana, Kementerian PUPR telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Satgas PPB) yang diatur melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1176/KPTS/M/2019. Melalui Keputusan Menteri PUPR tersebut, Satgas PPB PUPR memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

- ➔ Pusat Komando;
- ➔ Unit Pendukung; dan
- ➔ Unit Pelaksana.

**Pusat Komando** terdiri dari unsur pimpinan yang berperan sebagai pengarah, penentu kebijakan, pengambil keputusan, dan pengendali kegiatan penanggulangan bencana pada Tahap Pra Bencana, Tahap Darurat Bencana, dan Tahap Pasca Bencana. Adapun keanggotaan Pusat Komando terdiri atas:

- ➔ Ketua Satgas;
- ➔ Wakil Ketua;
- ➔ Ketua Harian Pusat Komando;
- ➔ Sekretaris; dan
- ➔ Anggota.

**Unit Pendukung** merupakan unit koordinasi dan Pos Pendukung Direktorat Jenderal masing-masing unit organisasi yang membantu tugas sehari-hari Pusat Komando Satgas PPB. Unit Pendukung terdiri atas:

**1. Sekretariat Satgas PPB PUPR**

Keanggotaannya ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan berada di Pusat Data dan Teknologi Informasi.

**2. Pos Pendukung Direktorat Jenderal**

Ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan berada di tiap unit organisasi/direktorat jenderal.

**3. Pos Siaga Bencana**

Berkedudukan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah di setiap provinsi.

**Unit Pelaksana** merupakan Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Tugas yang melaksanakan komando/perintah dari Pusat Komando dan berada di bawah koordinasi Unit Pendukung. Unit Pelaksana terdiri atas:

**1. Satuan Tugas Pelaksana (Satgaslak)**

Dibentuk oleh Sekretaris Jenderal apabila diperlukan.

**2. Tim Reaksi Cepat (TRC)**

Ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan/atau masing-masing Direktur Jenderal serta berkedudukan di Sekretariat Satgas PPB PUPR, dan/atau Pos Pendukung Direktorat Jenderal masing-masing, dan/atau Balai Besar/Balai/Satker untuk melaksanakan kaji cepat kebutuhan darurat bencana.

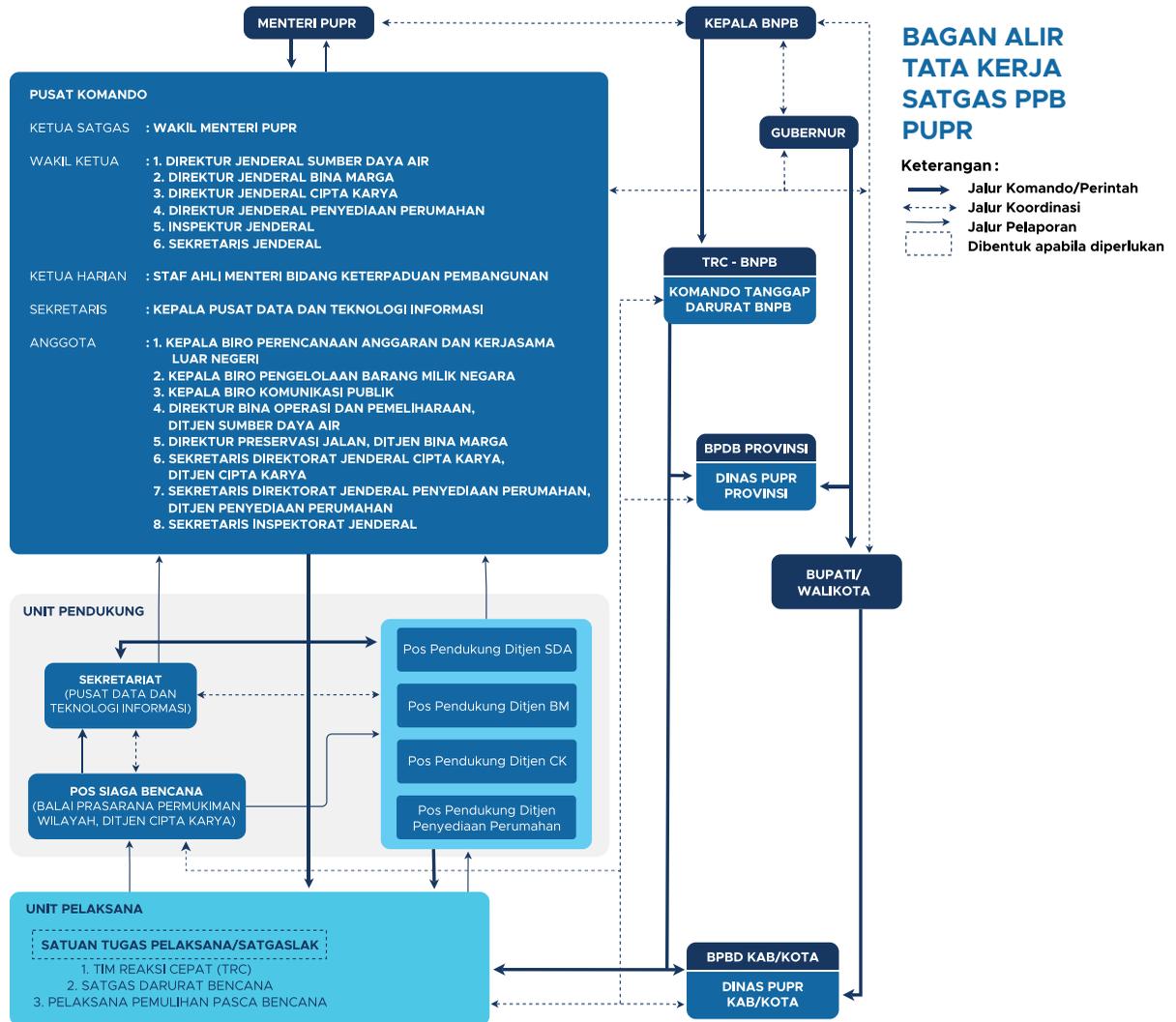
**3. Satuan Tugas (Satgas) Darurat Bencana**

Dibentuk oleh masing-masing Direktorat Jenderal yang akan diaktifkan segera setelah terjadi bencana untuk melaksanakan kegiatan darurat bencana.

**4. Pelaksana Pemulihan Pasca Bencana**

Dilaksanakan oleh masing-masing Unit Organisasi sesuai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan pemulihan pasca bencana.

Adapun struktur organisasi Satgas PPB PUPR adalah sebagai berikut:



Dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berskala nasional dan kerusakan infrastruktur bidang PUPR yang mencakup berbagai sektor (sumber daya air, jalan dan jembatan, sarana prasarana dasar permukiman, dan perumahan), Kementerian PUPR membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana (Satgas PPB) yang bertugas untuk mengkoordinir penanganan infrastruktur terdampak lintas sektor dan melibatkan berbagai pihak (K/L, Pemerintah Daerah, instansi lain, serta masyarakat).

Dalam proses penanganan pasca bencana alam di suatu wilayah tidak terlepas dari pelaksanaan pengadaan

barang/jasa. Dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur, bangunan perkantoran, sarana dan prasarana publik, serta rumah-rumah penduduk yang rusak terdampak bencana, ataupun relokasi. Oleh karena itu, dalam kondisi khusus seperti darurat bencana, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berbeda dengan kondisi normal karena membutuhkan kecepatan dan mendesak untuk segera ditangani.

Saat ini pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi dilakukan mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Pada kondisi bencana, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Penanganan Keadaan Darurat. Berangkat dari kedua regulasi tersebut dan kebutuhan akan pedoman khusus di Kementerian PUPR, maka telah diterbitkan pula SE Menteri PUPR No 17/SE/M/2021 tentang Mekanisme Pembayaran Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Penanganan Keadaan Darurat di Kementerian PUPR. Surat Edaran ini mengatur perihal proses pengadaan sebelum penyelesaian pembayaran untuk pengadaan jasa konstruksi dalam penanganan keadaan darurat, penyelesaian pembayaran untuk pengadaan jasa konsultasi konstruksi dalam penanganan keadaan darurat, dan penyelesaian pembayaran untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dalam penanganan keadaan darurat.

Surat Edaran ini memuat mekanisme pembayaran pengadaan jasa konstruksi dalam penanganan keadaan darurat. SE ini digunakan sebagai pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melakukan pembayaran pengadaan jasa konstruksi ketika penanganan keadaan darurat. Selain itu, SE juga bertujuan untuk menerapkan akuntabilitas dan good governance dalam penanganan keadaan darurat.

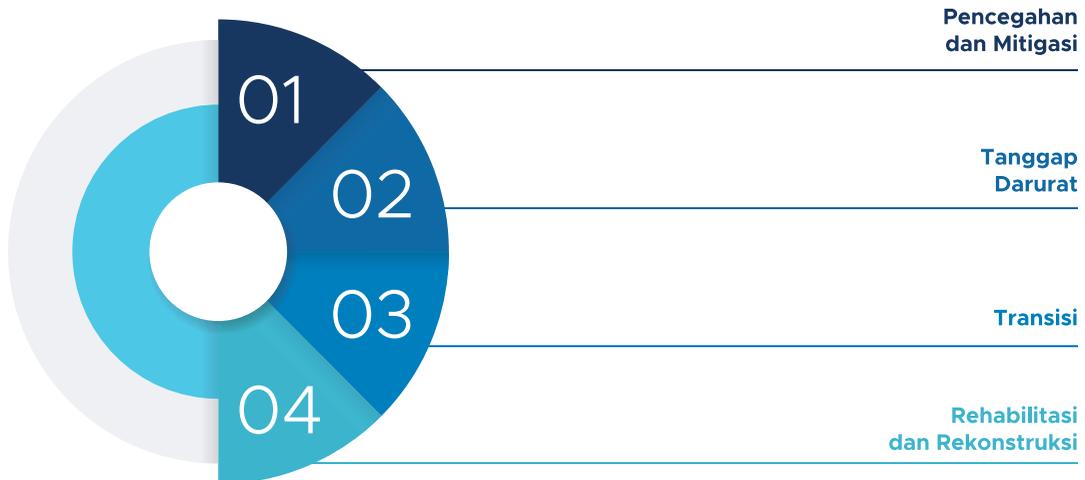
 **Kementerian PUPR membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Satgas PPB) yang bertugas untuk mengkoordinir penanganan infrastruktur terdampak lintas sektor dan melibatkan berbagai pihak (K/L, Pemerintah Daerah, instansi lain, serta masyarakat).**



Kementerian PUPR selalu meletakkan penanganan pasca bencana dalam tahapan yang sistematis, meliputi aspek pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi-rekonstruksi. Aspek pencegahan dan mitigasi dilakukan dengan membangun berbagai infrastruktur seperti sea wall, bangunan pengendali daya rusak air, sistem drainase perkotaan, penguatan struktur lereng dan perbukitan, pengenalan rumah tahan gempa (RTG), hingga informasi potensi dampak bencana yang secara rutin dipublikasi. Penanganan pasca bencana mulai tahap tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi selalu dipedomani. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat

kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, seperti evakuasi masyarakat dan materiil, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi, dan pemulihan sarana-prasarana secara darurat. Tahap transisi adalah penanganan darurat yang bersifat sementara berdasarkan kajian teknis dengan prasarana tersebut segera berfungsi sebelum dilakukan rehab-rekon atau penanganan permanen.

Sementara itu, rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik hingga tingkat yang memadai untuk aktivitas dapat pulih kembali. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana.

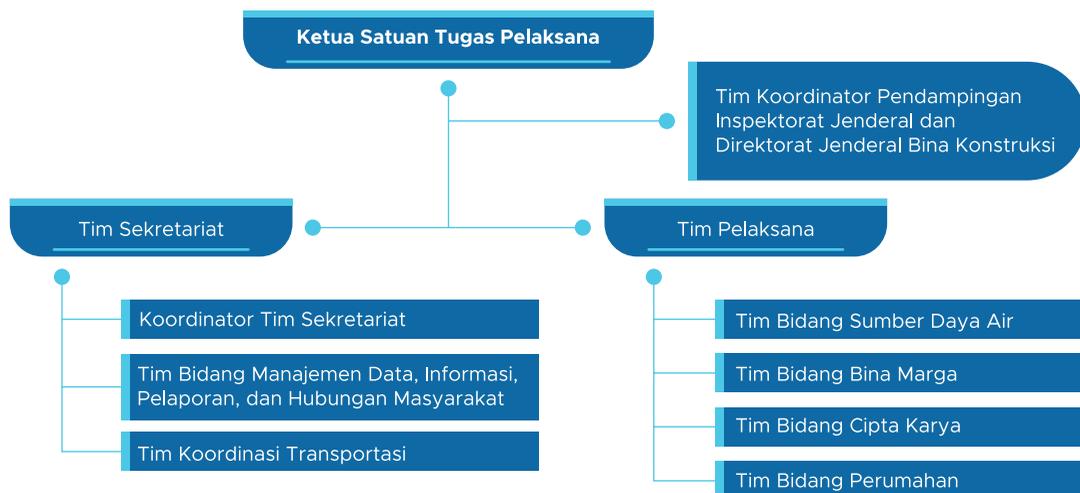


## B Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Provinsi NTT dan NTB

Dalam rangka penanganan bencana akibat badai Seroja di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 April 2021 dan bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Barat yang terjadi pada tanggal 2 April 2021, Kementerian PUPR dengan sigap pada tanggal 05 April 2021 membentuk Satgas Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi NTT dan Provinsi NTB dengan menerbitkan SK Sekretaris Jenderal nomor 314.1./KPTS/SJ/2021 dan yang kemudian disempurnakan melalui SK Sekretaris Jenderal Nomor 351.1/KPTS/SJ/2021 pada tanggal 9 Juni 2021. SK ini menetapkan struktur komando dan koordinasi penanganan bencana sebagaimana mengacu pada tata kelola kebencanaan yang telah diuraikan sebelumnya.

Surat Keputusan (SK) Satgaslak ini mengatur setidaknya empat struktur utama dalam penanganan bencana di NTT dan NTB, yaitu Ketua Satuan Tugas Pelaksana, Tim Koordinator Pendampingan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Tim Sekretariat, serta Tim Pelaksana. Setiap struktur memiliki peran penting dalam memastikan efektif, efisien, ekonomis, dan kepatuhan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Kementerian PUPR dengan sigap pada tanggal 05 April 2021 membentuk Satgas Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi NTT dan Provinsi NTB



Struktur Organisasi Satgas PPB di Provinsi NTT dan Provinsi NTB

Ketua Satuan Tugas Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan satgas agar terpadu antar sektor, menjalin komunikasi dan koordinasi dengan BNPB, BPBD, dan Kementerian/Lembaga/Instansi lain terkait, melaporkan perkembangan kepada Pusat Komando dan pimpinan Kementerian PUPR, serta BPKP untuk memastikan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan.

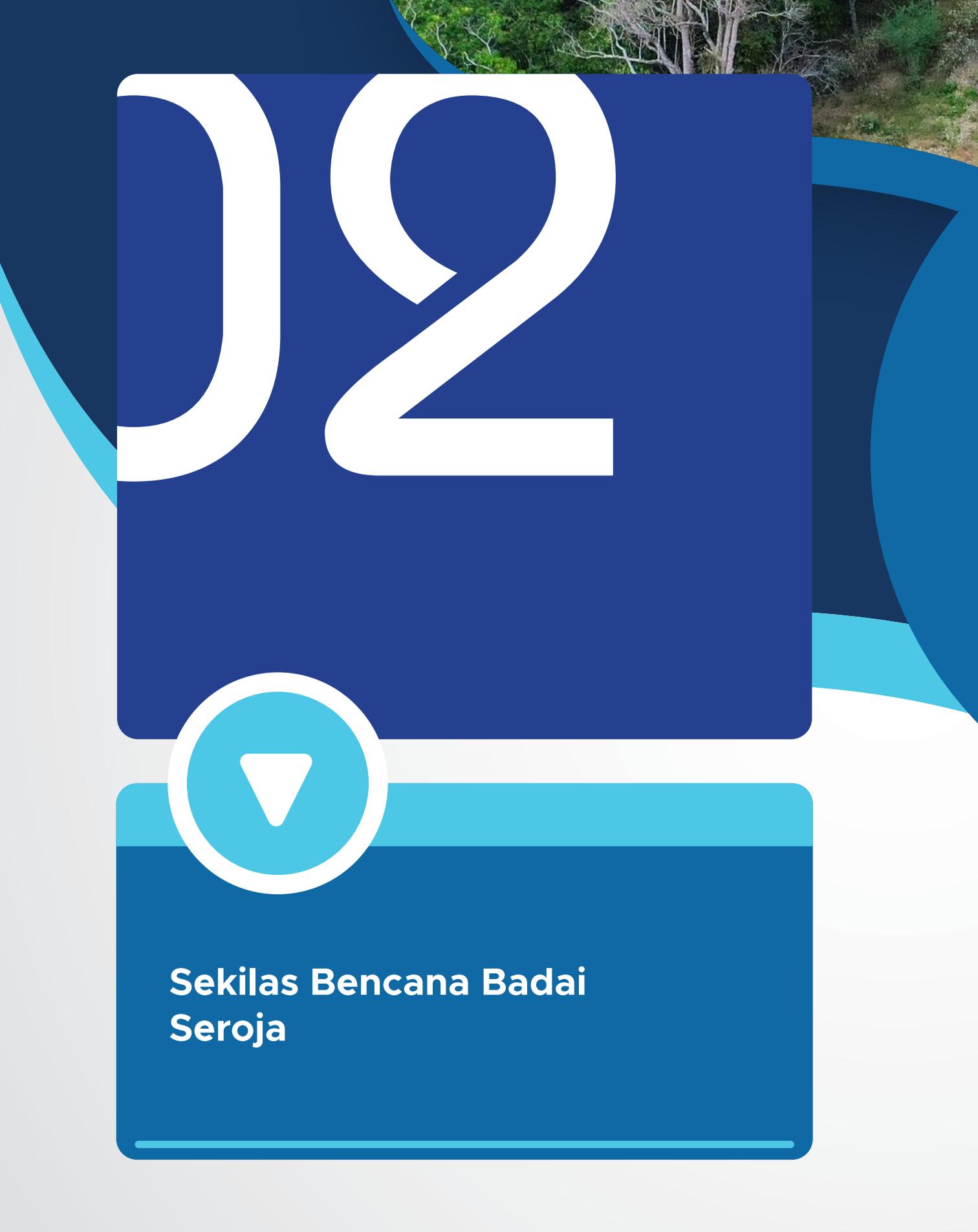
Tim Pelaksana Satgaslak yang terdiri dari Tim Bidang Sumber Daya Air, Tim Bidang Bina Marga, Tim Bidang Cipta Karya dan Tim Bidang Perumahan masing-masing memiliki tanggung jawab pelaksanaan penanganan bencana di Provinsi NTT dan NTB yang meliputi pendataan (Survei dan Investigasi), perencanaan (desain), pelaksanaan, dan penyelenggaraan administrasi dokumen pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan bidang masing-masing. Tim Bidang Sumber Daya Air (SDA) yang diketuai oleh Direktur Sungai dan Pantai. Tim Bidang Bina Marga (BM) yang diketuai oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan II. Tim Bidang Cipta Karya (CK) yang diketuai oleh Direktur Prasarana Kawasan Permukiman.

Tim Bidang Perumahan yang diketuai oleh Direktur Rumah Khusus. Koordinator Tim Koordinasi Pendampingan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bertugas untuk mengoordinasikan pendampingan pelaksanaan kegiatan untuk memberikan keyakinan atas akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan serta pengadaan barang dan jasa.

Tim Sekretariat Satgaslak terdiri dari Koordinator Tim Sekretariat, Tim Bidang Manajemen Data, Informasi, Pelaporan dan Hubungan Masyarakat, Tim Koordinasi Transportasi, dan Tim Operasional Kesekretariatan.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur bertugas untuk mengkoordinir penyelenggaraan pos komando (Posko) Satgas, sedangkan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan data, informasi, dan mendukung penyusunan konsep pelaporan untuk pimpinan Kementerian PUPR serta menyelenggarakan komunikasi publik. Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan kesungguhan Kementerian PUPR dalam menangani infrastruktur terdampak bencana secara cepat dan terstruktur dalam rangka segera mengembalikan kondisi dan fungsi secara permanen agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar untuk pemerintah dan masyarakat, sekaligus sebagai wujud kehadiran negara.





# 02



**Sekilas Bencana Badai  
Seroja**

---

An aerial photograph showing a paved road with yellow and white lane markings. A significant landslide has occurred on the right side of the road, with a large amount of brown earth and rocks having shifted onto the road surface. A yellow traffic cone is visible on the road near the landslide. The background shows a hilly, vegetated area.

## → Bencana Badai Seroja

# BAB 2

## Sekilas Bencana Badai Seroja

### Bencana Badai Seroja

Kejadian badai siklon tropis Seroja yang melanda wilayah NTT dan NTB pada tanggal 4 April 2021 tercatat sebagai siklon tropis terkuat dan berdampak besar yang pernah terjadi di Indonesia. Siklon tropis Seroja ini mengakibatkan 182 korban meninggal, 47 korban hilang, 136 korban luka-luka, dan 474.492 korban terdampak. Selain itu, bencana ini juga merusak berbagai infrastruktur antara lain yaitu 3.513 fasilitas umum, 30.369 rumah rusak ringan, 11.473 rumah rusak sedang, dan 13.361 rumah rusak berat, sekaligus juga memperburuk kondisi perekonomian masyarakat yang saat itu sedang dilanda pandemi Covid-19.

#### Sumber

<https://micms.mediaindonesia.com/storage/app/media/FOTO/Operator/18-Badai%20Seroja.jpg>



- Badai Siklon Tropis Seroja dengan dahsyat melanda wilayah Nusa Tenggara sehingga mengakibatkan bencana di beberapa Kabupaten NTT dan NTB (4 April 2021).
- SK Sekjen Menteri PUPR No. 314.1/KPTS/Sj/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pembentukan Satgas Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi NTT dan NTB.
- SK Gubernur NTT No. 118/KEP/HK/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Status Darurat Penanganan Bencana Alam Seroja.
- Rapat Koordinasi PUPR, BNPB, dan Pemda (6 April 2021).



**4-6 April  
2021**

- Pemetaan kerusakan infrastruktur oleh tim dari SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya. Pengerahan alat berat untuk membuka jalan akses, pembersihan, dan evakuasi.
- Penurunan Tim Reaksi Cepat Perumahan untuk melakukan pendataan rumah terdampak.
- Laporan Kejadian Bencana dan Kerusakan Infrastruktur Bidang Jalan dan Jembatan melalui surat Kepala BPJN ke Dirjen Bina Marga.
- SPMK Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan secara bertahap (sampai dengan 29 April 2021).

**7-8 April  
2021**

**9 April  
2021**



- Kunjungan Presiden bersama Menteri PUPR ke Adonara dan Lembata serta arahan untuk merelokasi kedua lokasi tersebut.
- Arahan Menteri PUPR untuk relokasi huntap menggunakan panel risha.

**11 April  
2021**

**12-14  
April  
2021**



- Rakor Satgas Bencana PUPR untuk menentukan langkah penanganan melalui mekanisme penunjukan langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

**16-20  
April  
2021**

- Pematangan lahan, pembangunan mockup dan proses mobilisasi panel risha ke lokasi relokasi (sampai Mei 2021).
- Pemetaan Penugasan Penyedia Jasa di BPJN dan BWS, dan BPPW.
- Surat Kepala BPJN NTT ke Dirjen BM tentang Permohonan Pembiayaan Penanganan Infrastruktur di Provinsi NTT yang Disebabkan Cuaca Ekstrem Seroja.

- Dirjen Perumahan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pembangunan Huntap NTT-NTB secara bertahap (16 April sampai 10 Mei 2021).
- Surat Dirjen BM ke Menteri PUPR tentang Pemeriksaan Kerusakan dan Kebutuhan Biaya Penanganan Pasca Cuaca Ekstrem Siklon Tropis Seroja.
- Investigasi lapangan dan konsep desain Bendung Kambaniru, Bendung Bing, Bendung Benanain, dan Bendung Mena oleh Tim Bintek SDA dan Balai Teknik Irigasi.





**22 April**  
2021

SPMK dan SPPBJ untuk pembangunan huntap (sampai dengan 11 Juni 2021):

- Kab. Flores Timur dan Kab. Lembata (22-23 April)
- Kab. Bima dan Kab. Dompu (10 Mei).
- Kab. Sumba Timur, Kab. Kupang, dan Kota Kupang (10-11 Juni).

**28 April**  
2021

Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan No. KU.0212-Mn/776 terkait permohonan tambahan anggaran dari BA BUN 999.08.

**s/d Mei**  
2021

- Tim Reaksi Cepat Perumahan meninjau ke calon lokasi relokasi di Adonara dan Lembata. Terdapat 4 kabupaten lain yang ikut terdampak (3 Mei).
- Finalisasi desain beberapa bendung oleh Direktur Sungai Pantai, Direktur Irigasi dan Rawa, dan Direktur Bina Teknik SDA.
- Penanganan secara darurat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan agar dapat fungsional dengan menggunakan dana cadangan bencana/PMTD sebesar Rp 24,63 M (April s/d Mei 2021).

**s/d Maret**  
2022

Penanganan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan secara permanen dengan cara penunjukan langsung kepada BUMN terdekat dengan lokasi yang terbagi menjadi 5 klaster penanganan dan 1 klaster pengawasan sebesar Rp 345,54 M.

**April**  
2022

Rapat 1 tahun Penanganan Bencana Bersama Satgas Bencana Alam.

**s/d Mei**  
2021

Pelaksanaan konstruksi relokasi di 6 kab. di NTT (Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, Kab. Kupang, Kota Kupang, Kab. Sumba Timur, Kab. Alor) dan 2 kab. di NTB (Kab. Dompu, Kab. Bima).

Sebelum terjadinya badai Seroja di NTT, pengaruh awal siklon telah menyebabkan hujan lebat yang mengakibatkan banjir bandang pada tanggal 2 April 2021 di Kota/Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu Provinsi NTB.

Merespon kejadian bencana tersebut di atas, Kementerian PUPR secara cepat membentuk Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT dan Provinsi NTB.



### Siklon tropis

Seroja ini mengakibatkan 182 korban meninggal, 47 korban hilang, 136 korban luka-luka, dan 474.492 korban terdampak

# 03



**Pelaksanaan Manajemen/  
Tata Kelola Penanganan  
Bencana**

- 
- An aerial photograph of a road with a significant landslide. A large, dark blue circular graphic is overlaid on the left side of the image, containing two bullet points. The road is paved and has yellow and white markings. A yellow traffic cone is visible on the road near the landslide. The surrounding area is dry and hilly.
- Kerangka Manajemen/Tata Kelola Penanganan Bencana NTT & NTB
  - Siklus Penanggulangan Bencana

# BAB 3

## Pelaksanaan Manajemen/ Tata Kelola Penanganan Bencana

### A Kerangka Manajemen/ Tata Kelola Penanganan Bencana NTT dan NTB

Bencana badai Seroja tahun 2021 silam yang lokasinya tersebar di 2 provinsi meliputi 16 kabupaten/kota dengan total ± 563 kegiatan/lokasi dengan karakteristik kepulauan yang pada umumnya terisolir/sulit dijangkau dan kerusakan infrastruktur berdampak mencakup berbagai sektor sehingga membutuhkan rantai pasok sumber daya tenaga kerja, material, dan peralatan yang bersifat masif dari sisi waktu, jumlah, dan kualitas memerlukan manajemen/tata kelola serta akuntabilitas pertanggungjawaban yang baik.

Pelaksanaan penanganan bencana tersebut di atas mutlak mensyaratkan manajemen atau tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip manajemen, antara lain:

- a. Prinsip 5 M (*Man, Money, Material, Machine, and Method*)
- b. Prinsip 5 W + 1 H (*What, Who, When, Why, Where, How*)
- c. Prinsip POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*).
- d. Prinsip SIDLACOM (*Survey, Investigation, Design, Land Acquitition, Construction, Operation, and Maintenance*)

Penerapan prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi pendekatan dalam pelaksanaan penanganan bencana di Provinsi NTT dan NTB sehingga dapat dilaksanakan dengan cepat, terstruktur, terukur, dan terkendali serta akuntabel.

 Penanganan Bencana badai Seroja tahun 2021 silam yang lokasinya tersebar di 2 provinsi meliputi 16 kabupaten/kota dengan total ± 563 kegiatan/lokasi mutlak memerlukan manajemen/tata kelola yang baik

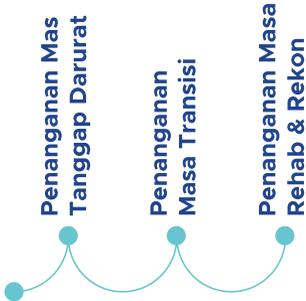
**5W + 1H**  
(What - Who - When - Where - Why - How)

**POAC**

**Good Governance**

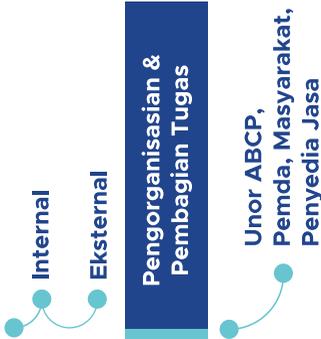
**Planning**

Perencanaan Strategis, Teknis, Ops



**Organizing**

Sinergi & Koordinasi



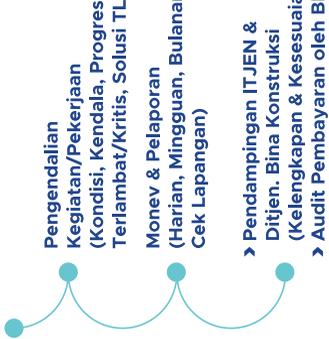
**Actuating**

Manajemen SIDLACOM



**Controlling**

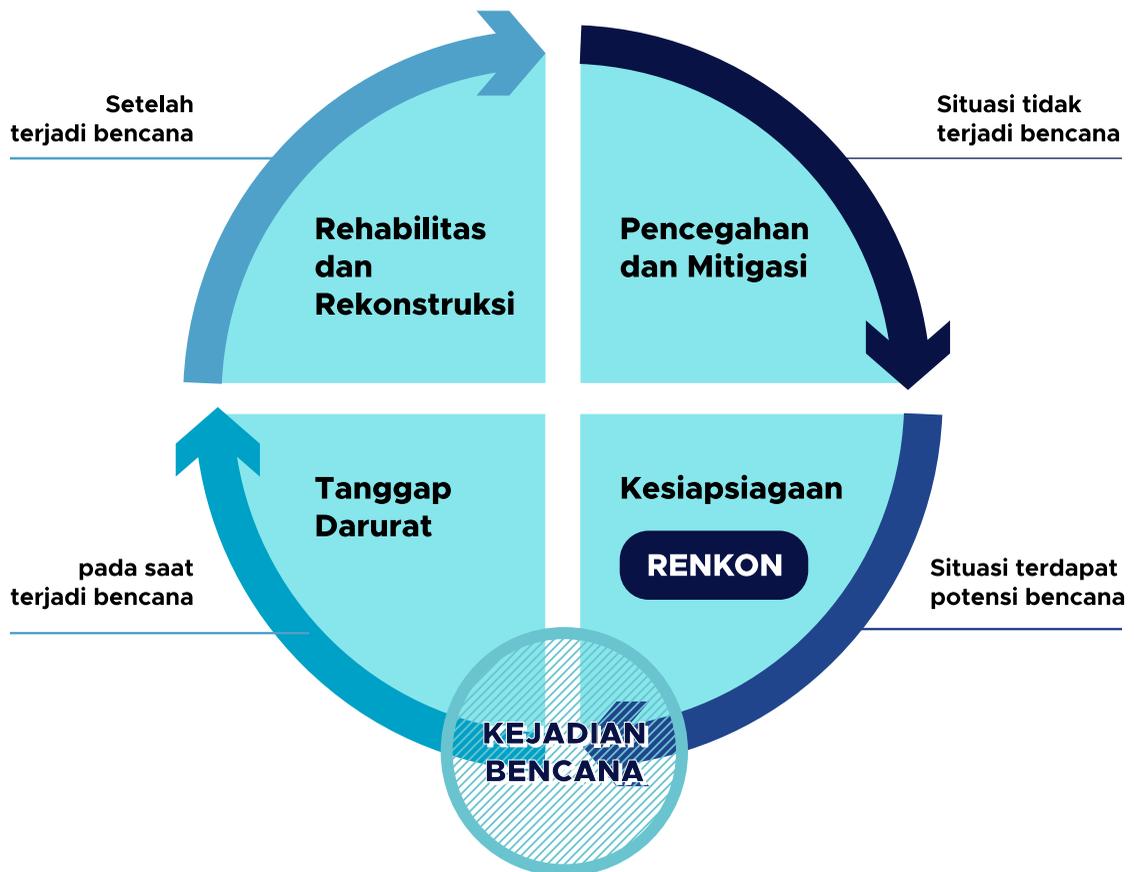
Monitoring & Evaluasi



## B Siklus Penanggulangan Bencana

Penanggulangan pasca terjadinya bencana yang dilakukan Kementerian PUPR selalu mengacu pada siklus penanggulangan bencana. Dimulai

dari penetapan status keadaan darurat bencana, penanganan tanggap darurat, penanganan masa transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.



**Penetapan status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

**Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan **segera pada saat kejadian bencana** untuk **menangani dampak buruk yang ditimbulkan**, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

**Transisi darurat bencana ke pemulihan** adalah keadaan dimana penanganan darurat **bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dan instansi yang berwenang)** dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

**Rehabilitasi** adalah **perbaikan dan pemulihan** semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

**Rekonstruksi** adalah **pembangunan kembali** semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

04



**Gerak Cepat:  
Penanganan Masa Tanggap  
Darurat**

- 
- An aerial photograph of a paved road curving through a dry, hilly landscape. A significant landslide has occurred on the right side of the road, with a large amount of earth and rocks having shifted onto the road surface. A yellow traffic cone is visible on the road near the landslide. A large blue graphic overlay, consisting of a circle and a tail, is positioned on the left side of the image. Inside the circle, there is a list of three items, each preceded by a right-pointing arrow icon.
- Membuka jalur akses logistik
  - Proses evakuasi korban
  - Distribusi sarana prasarana umum

# BAB 4

## Gerak Cepat: Penanganan Masa Tanggap Darurat

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penanganan darurat pada masa awal tanggap darurat bertujuan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur secara darurat. Penanganan pada masa ini setidaknya-tidaknya terdiri atas 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu membuka jalur akses logistik, dukungan alat berat untuk evakuasi korban, penyediaan/distribusi sarana prasarana umum

### A Membuka Jalur Akses Logistik

Dalam rangka membuka dan memulihkan fungsi secara darurat jalur akses logistik sehingga distribusi bantuan kemanusiaan segera dapat menjangkau ke wilayah-wilayah terdampak/terisolasi dan lalu lintas perekonomian kembali berjalan, dilakukan pengerahan alat-alat berat oleh Tim Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Marga.



**Jalan Daerah Ruas Taramana – Lantoka –  
Maritaring (Kab. Alor)**



*Kondisi*



*Penanganan*

**Jalan Nasional Ruas Bokong - Batu Putih STA  
74+100 (Kab. Kupang)**



*Kondisi*



*Penanganan*

## Jembatan Benanain (Kab. Malaka)



*Kondisi*



*Penanganan*

## Jembatan Taramana 2 (Kab. Alor)



*Kondisi*



*Penanganan*

## B Proses Evakuasi Korban

Pengerahan alat-alat berat oleh Satgas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT dan Provinsi NTB dalam rangka mendukung proses evakuasi korban difokuskan pada 2 (dua) lokasi, yaitu di Adonara (Flores Timur) dan Lembata yang terjadi banjir bandang debris batuan besar yang menyapu beberapa desa, sekaligus juga dalam rangka pembersihan lapangan.





Foto Presiden Meninjau Lokasi Terdampak di Lembata



## C Distribusi sarana prasarana umum

Disamping pengerahan alat-alat berat dalam rangka membuka jalur/akses logistik/perekonomian dan membantu evakuasi korban serta pembersihan lokasi terdampak banjir bandang

debris batuan besar, fokus ketiga pada masa awal tanggap darurat adalah untuk memberikan dukungan penyediaan sarana prasarana umum bagi masyarakat terdampak berupa antara lain mobile sanitasi, mobil tangki air, dan hidran umum.

●● fokus ketiga pada masa awal tanggap darurat adalah untuk memberikan dukungan penyediaan sarana prasarana umum bagi masyarakat terdampak berupa antara lain mobile sanitasi, mobil tangki air, dan hidran umum.

## D Data Mobilisasi Alat Berat dan Sarana Prasarana Umum

Disamping pengerahan alat-alat berat dalam rangka membuka jalur/akses logistik/perekonomian dan membantu evakuasi korban serta pembersihan lokasi terdampak banjir bandang

debris batuan besar, fokus ketiga pada masa awal tanggap darurat adalah untuk memberikan dukungan penyediaan sarana prasarana umum bagi masyarakat terdampak berupa antara lain mobile sanitasi, mobil tangki air, dan hidran umum.



## E Tantangan pada Masa Awal Tanggap Darurat

Penanganan pada masa awal tanggap darurat merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana, karena banyaknya tantangan yang harus dihadapi dengan kerja keras dan semangat militansi, antara lain:

### a. Data dan Informasi

Data dan informasi yang andal sangat diperlukan pada masa-masa awal tanggap darurat untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan di tingkat nasional maupun pelaksanaan di tingkat operasional/lapangan. Dalam rangka menyediakan data dan informasi tersebut, secara paralel dilakukan pendataan (survei dan identifikasi) lokasi yang masih memerlukan pengerahan alat berat dan distribusi sarana prasana umum, serta mendata kerusakan infrastruktur PUPR yang terdampak. Survei dan identifikasi dalam rangka pendataan tersebut dilakukan setiap hari dan dikonsolidasikan setiap malam sebagai bahan perencanaan kegiatan hari selanjutnya dan bahan desain penanganan darurat atau perbaikan permanen (pemulihan kondisi fisik dan fungsi), serta sebagai bahan koordinasi dengan instansi terkait.

### b. Kecepatan dan Ketepatan Respon

Kinerja pelaksanaan penanggulangan bencana khususnya pada masa awal tanggap darurat memerlukan kecepatan dan ketepatan respon

dalam menjawab kebutuhan dan tantangan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi intensif, kekompakan dan militansi tim baik di lingkungan internal Satgas maupun sinergi dengan pihak eksternal.

### c. Keterbatasan Kondisi dan Sumber Daya di Wilayah Terdampak Bencana

Karakteristik lokasi kepulauan di wilayah Nusa Tenggara menjadi tantangan tersendiri dalam memobilisasi alat berat dan sarana prasarana umum. Hal ini ditangani dengan akurasi pemetaan data ketersediaan dan kebutuhan sumber daya (tenaga kerja, alat berat, material, BBM, alat pendukung lainnya, dan moda transportasi).

### d. Pandemi Covid-19

Adanya pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan (PSBB dan PPKM) pada masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri dalam mobilisasi tenaga kerja dari luar Pulau Nusa Tenggara, produksi material fabrikasi, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam rangka survei, inventori dan pelaksanaan konstruksi yang berdampak pada kelangkaan dan kemahalan barang/jasa. Hal tersebut diatasi melalui upaya koordinasi dengan penyedia jasa dan para pihak terkait (Otoritas Pelabuhan, Kepolisian, Pemda, Layanan Ekspedisi, dan lain-lain).



# 05



**Penanganan Masa Transisi:  
Mempercepat Pemulihan  
Kondisi Dan Fungsi**

- 
- Sinergi dan Koordinasi
  - Manajemen Konstruksi (SIDLACOM)
  - Pertimbangan dalam Pemilihan Penyedia Jasa
  - Pelaksanaan Build Back Better

# BAB 5

## Penanganan Masa Transisi: Mempercepat Pemulihan Kondisi Dan Fungsi

**Penanganan masa transisi (peralihan masa tanggap darurat menuju masa rehabilitasi/rekonstruksi) bertujuan untuk mengembalikan kondisi dan fungsi infrastruktur dalam melayani publik secara cepat dan permanen sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah dengan menerapkan prinsip *Build Back Better*.**

**Untuk itu, diperlukan kepemimpinan yang dapat menciptakan sinergi dan koordinasi yang baik di dalam internal tim Satgas dan dengan berbagai pihak lain yang terlibat melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam setiap tahapan manajemen konstruksi yang meliputi *Survey, Inventory/Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance (SIDLACOM)*.**

### **A Sinergi dan Koordinasi**

Guna menjawab tantangan penyelesaian pekerjaan pada masa tanggap darurat dan masa transisi pemulihan secara cepat namun terjaga akuntabilitasnya, diperlukan sinergi dan koordinasi untuk menyatukan gerak dan langkah secara kompak dan semangat militansi. Hal ini dimulai dengan pengumpulan, konsolidasi data/informasi maupun monitoring/evaluasi yang dilakukan setiap hari dengan memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan untuk

penyusunan keterpaduan program antar sektor, perencanaan/desain, dan keterpaduan pelaksanaan di lapangan. Pemanfaatan teknologi informasi menggunakan tools kolaborasi Google Workspace dapat meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dalam pengumpulan informasi dimana dengan tools tersebut data dan informasi dapat dikumpulkan pada suatu media penyimpanan online yang dapat diakses oleh banyak orang. Sehingga, pengambilan keputusan berdasarkan data dapat dilakukan secara cepat dan tepat.



*Rapat dengan Balai di Wil. NTB*



*Rapat dengan Wamen PUPR*



*Pendampingan Inspektorat Jenderal*



*Pendampingan Ditjen Bina Konstruksi*



*Survei Hidrologi Ditjen SDA*



*Rapat Persiapan SID*

Kementerian PUPR melakukan koordinasi intensif tidak hanya di lingkungan internal tetapi juga dengan pihak eksternal antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Desa, TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta masyarakat pemilik lahan dan lingkungan pekerjaan. Langkah koordinatif ini bertujuan untuk kolaborasi dan sinergi dalam penyelesaian penanggulangan bencana secara cepat, tepat sasaran, lancar dan aman.



*Koordinasi dengan Mako Brimob*



*Koordinasi dengan Gubernur NTT*



*Koordinasi dengan Bupati Lembata*

kolaborasi dan sinergi dalam penyelesaian penanggulangan bencana secara cepat, tepat sasaran, lancar dan aman.



*Koordinasi dengan Gereja Katedral*



*Koordinasi dengan Penyedia Jasa*



*Koordinasi dengan TNI*



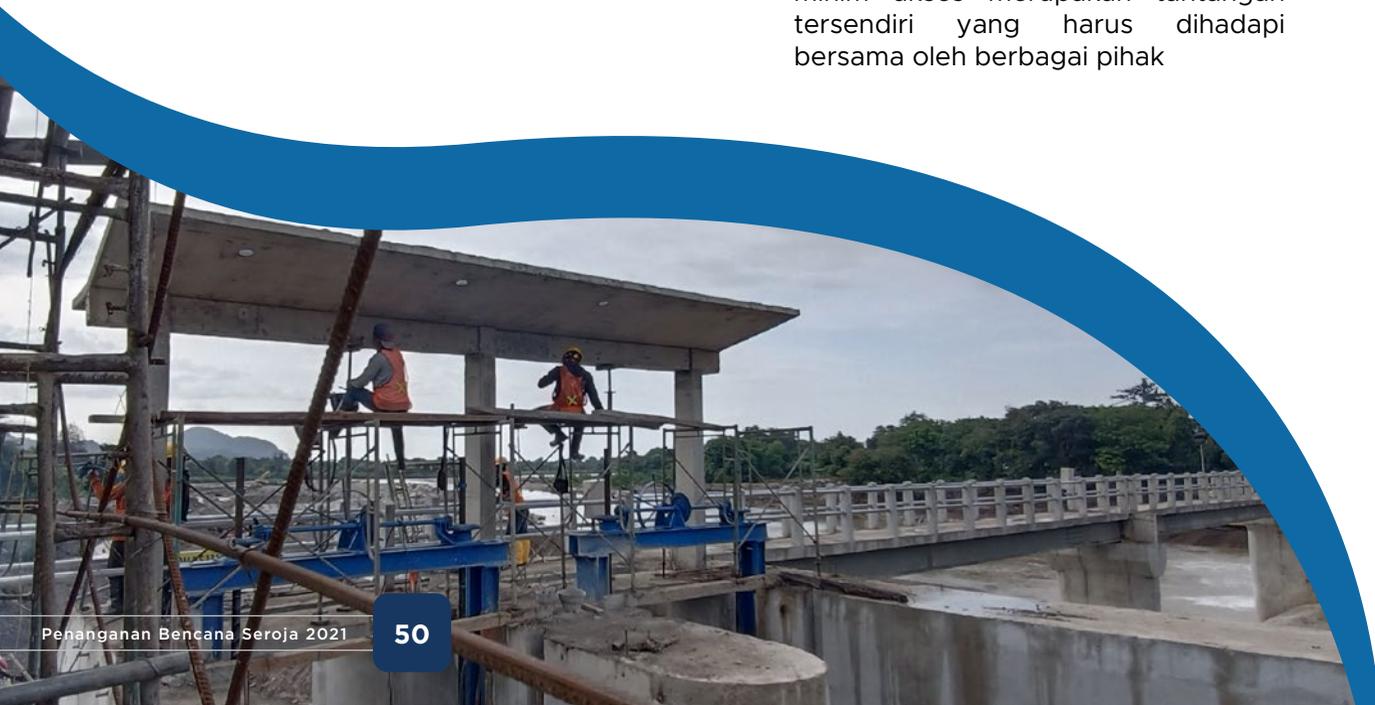
*Koordinasi dengan Masyarakat*

Terkait program relokasi permukiman, serangkaian sinergi, koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci kecepatan dan keberhasilan program relokasi permukiman. Dimulai dari pengusulan lokasi relokasi yang melibatkan pemilik lahan dan masyarakat yang akan direlokasi, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Serta Tim Satgas dalam menentukan kelayakan teknis lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi relokasi dengan memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat yang merupakan kearifan lokal agar memenuhi prinsip Build Back Better (Membangun lebih kuat, Berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, baik dari segi kualitas hidup maupun kesejahteraan). Sinergi Kolaborasi dan Koordinasi berbagai pihak dalam pelaksanaan program relokasi permukiman dapat digambarkan sebagai berikut :

● ● Terkait program relokasi permukiman, serangkaian sinergi, koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci kecepatan dan keberhasilan program relokasi permukiman

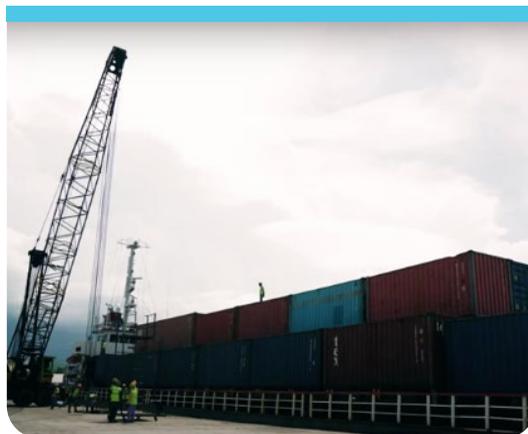
Kementerian PUPR	Pemerintah Daerah	Masyarakat	Instansi lain
<p><b>SDA</b> Penyediaan Air Baku, Membantu penyusunan kajian teknis terkait kelayakan kondisi geologi</p> <p><b>BM</b> Mendukung pembukaan/perbaikan akses jalan</p> <p><b>CK</b> Penataan Kawasan Permukiman, Jaringan air minum, jaringan sanitasi, penyediaan prasarana sampah 3R Verifikasi lokasi relokasi</p> <p><b>Perumahan</b> Verifikasi lokasi relokasi dan Pembangunan perumahan dengan pemanfaatan teknologi RISHA serta sosialisasi program relokasi</p>	<p><b>Pemerintah Kab/Kota</b> Koordinasi penyediaan lahan, sosialisasi program relokasi dan pengundian penetapan penempatan rumah, Pembinaan pasca relokasi</p> <p><b>Pemerintah Desa</b> Koordinasi penyediaan lahan dan sosialisasi program relokasi</p>	<p><b>Pemilik Lahan</b> Mendukung penyediaan lahan relokasi (mayoritas secara cuma –cuma)</p> <p><b>Masyarakat yang akan direlokasi</b> Pemahaman dan kesiapan relokasi</p>	<p><b>BPN</b> Memastikan terkait batas-batas lahan yang akan digunakan sebagai lahan relokasi serta proses administrasi status tanah</p> <p><b>KLHK</b> Menentukan status perizinan lahan relokasi yang terkait dengan kawasan hutan</p> <p><b>PLN</b> Penyediaan jaringan listrik kawasan relokasi</p>

Kondisi geografis dan topografi area relokasi permukiman yang tersebar di berbagai pulau dan pelosok yang minim akses merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi bersama oleh berbagai pihak





*Foto Pengangkutan Panel Risha menggunakan Kapal*



*Foto Proses Penurunan Panel Risha dari Kapal*



*Foto Pengangkutan Panel Risha Menggunakan Truk ke Lokasi Relokasi*



*Foto Progres Pembangunan Risha di Ds. Nulle*



*Foto Hasil Relokasi Pembangunan Risha di Ds. Nulle*



Foto Relokasi Pembangunan di Ds.  
Tanah Merah, Lembata



Foto Relokasi Pembangunan di Ds.  
Tanah Merah, Lembata

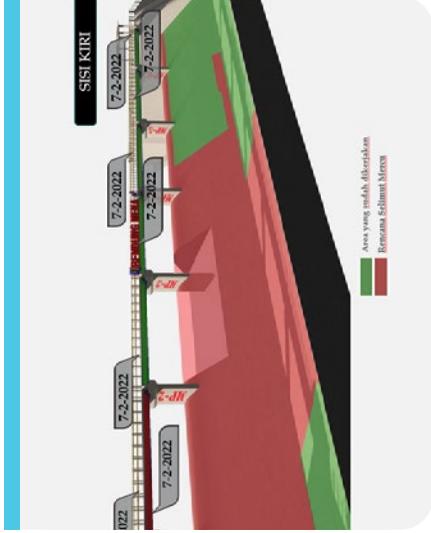
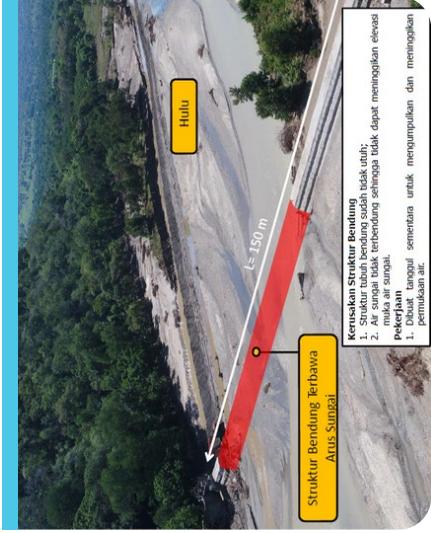
## B Manajemen Konstruksi (SIDLACOM)

Dalam pelaksanaan konstruksi infrastruktur bidang PUPR yang terdampak bencana Siklon Tropis Seroja di NTT dan NTB mengikuti tahapan manajemen konstruksi yang merupakan standar di Kementerian PUPR yaitu SIDLACOM (*Survei, Investigation, Design, Land Acquisition, Action Programme, Construction,*

*Operation, Maintenance*). Tahapan manajemen konstruksi ini untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan secara sistematis berdasarkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang baik.

Proses SIDLACOM di dalam penanganan infrastruktur terdampak bencana tergambar dalam beberapa contoh berikut ini:

**SIDLACOM** (*Survei, Investigation, Design, Land Acquisition, Action Programme, Construction, Operation, Maintenance*)

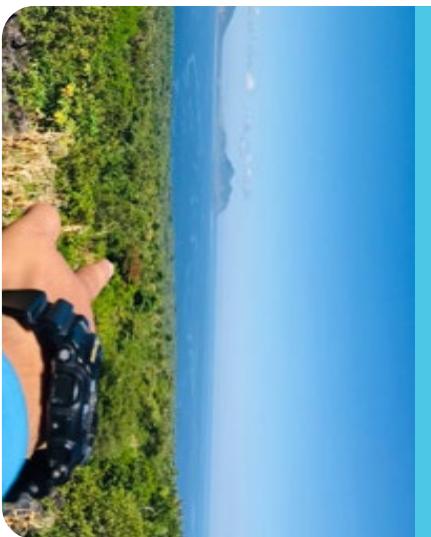


## Survey-Inventori dan Investigation

## Design

## Construction

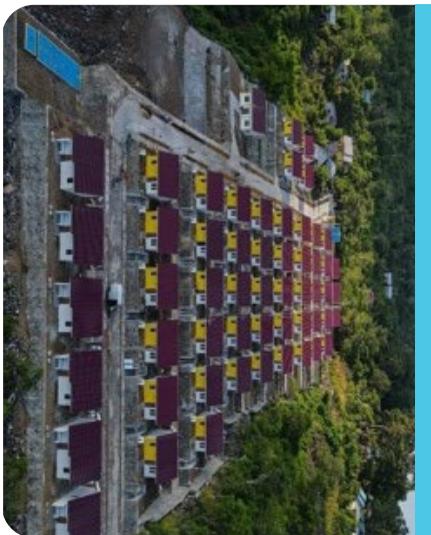
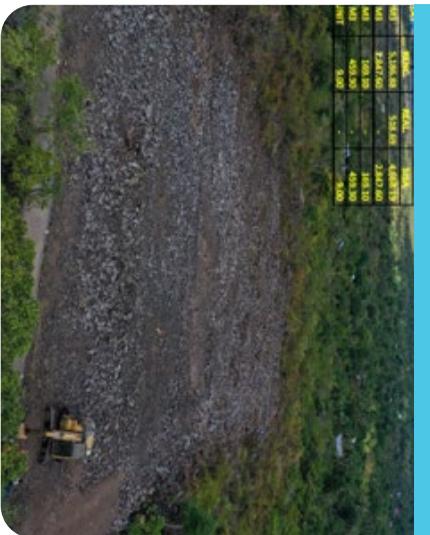
# Penerapan SIDLACOM di Bendung Mena



Survey-Inventori dan Investigation



Design



Construction

Penerapan SIDLACOM di Desa Nelelamadike

# C

## Pemilihan Penyedia Jasa

Dalam rangka percepatan penanganan bencana, salah satu kuncinya adalah kecepatan didalam mengerahkan penyedia jasa (konsultan maupun kontraktor) BUMN untuk membantu pelaksanaan mulai dari penanganan masa awal tanggap darurat untuk pengerahan personil dan alat-alat berat yang dimiliki sekaligus membantu melaksanakan proses survei, inventori/ investigasi, dan desain, sampai dengan pelaksanaan konstruksi dan supervisi pengawasannya. Kecepatan mobilisasi penyedia jasa perlu dilandasi pemilihan penyedia jasa yang akuntabel berdasarkan kriteria:

- a. Penunjukan penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor) BUMN dilandasi bahwa BUMN sebagai penyedia jasa milik negara

juga mempunyai peran untuk melaksanakan penugasan oleh negara

- b. Penanganan bencana memerlukan kecepatan penunjukan dan pelaksanaan disilain membutuhkan anggaran yang sangat besar namun belum tersedia anggarannya, sehingga setelah diterbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) harus dilaksanakan melalui mekanisme pre-financing oleh penyedia jasa (Kontraktor maupun Konsultan) BUMN dalam konteks penugasan oleh negara, yang akan dibayar setelah pekerjaan selesai.
- c. Pemetaan pembagian tugas kontraktor (Lokasi kerja) dan konsultan (Pelayanan Unit Organisasi) ditetapkan dengan kriteria sebagaimana gambar berikut:

### KONSTRUKSI (Klustering Wilayah)

**Klustering Wilayah**  
1 Kontraktor – 1 Wil. Kerja

Kontraktor BUMN sedang  
Melaksanakan Kegiatan/ Kontrak di  
Lokasi Terdekat

- ➔ Pengalaman / Kompetensi Penyedia Jasa
- ➔ Efisiensi Mobilisasi Alat Berat & Personel
- ➔ Hindari Konflik Antar Kontraktor dalam 1 Wilayah

### KONSULTANSI (Klustering Unor)

**Klustering Ditjen/Unor**  
1 Konsultan – 1 Unor  
(Kecuali SDA)

Konsultan BUMN yang sedang  
Melaksanakan Kegiatan/ kontrak dengan  
Unor ABCP pada Wilayah Terkait

- ➔ Pengalaman / Kompetensi Penyedia Jasa
- ➔ Efisiensi Mobilisasi Personel
- ➔ Kemudahan Pengendalian Oleh Unor (Prinsip Konsultan adl Pembantu Unor Dalam Pengendalian Kegiatan)



**Klaster Pembagian Tugas Penanganan Bencana Alam Seraja Berbasis Wilayah**

# D

## Pelaksanaan *Build Back Better*

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang terdampak bencana dilaksanakan dengan pendekatan *Build Back Better*.

### Pendekatan

## “*Build Back Better*”

berperan dalam mitigasi karena tidak hanya sekedar membangun kembali rumah atau bangunan yang hancur namun membangun masyarakat yang tangguh bencana.



### Prinsip

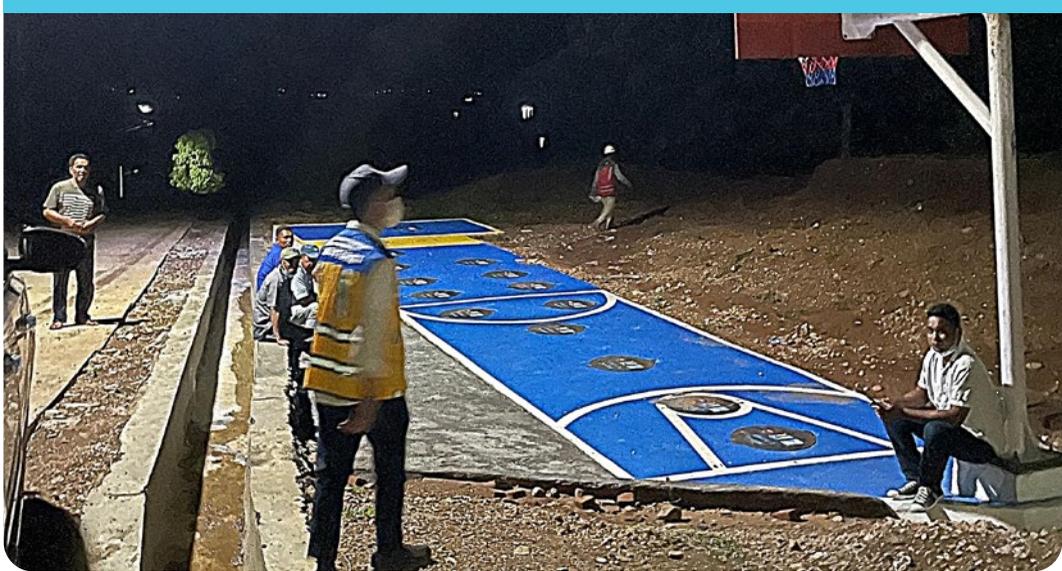
Cepat memfungsikan kembali infrastruktur layanan publik yang lebih tangguh  
Aman dalam mencegah risiko bencana di kemudian hari  
Mampu memulihkan dan meningkatkan aktivitas masyarakat



*Penggunaan Teknologi Risha yang Tahan Gempa di dalam Pembangunan 294 Rumah Relokasi di Desa Tanah Merah Kab. Lembata*



*Penanganan Longsoran dengan Menggunakan Teknologi Soil Nailing dan Shotcrete Pada Jalan Nasional Ruas Jalan Bokong - Batu Putih, Kab. Kupang*



*Prasarana IPAL Komunal Sekaligus Dimanfaatkan untuk Prasarana Olahraga Basket*



*Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di Kawasan Relokasi Pemukiman*



*Bangunan Sekolah Dasar Wardabi di Kabupaten Alor*



*Kunjungan Kerja Wakil Menteri PUPR*



***Good Governance:***  
**Ketentuan dan Pelaksanaan**  
**Pengadaan Barang/Jasa dan**  
**Anggaran Penanganan Bencana**

- 
- An aerial photograph of a road with a significant landslide on the right side. A large blue circular graphic is overlaid on the left side of the image, containing a list of bullet points. The road has yellow and white markings. A yellow traffic cone is visible on the road near the landslide. The background shows dry, hilly terrain with sparse vegetation.
- Tahapan PBJ Penanganan Keadaan Darurat
  - Jenis Anggaran dalam Penanganan Bencana
  - Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran
  - Perbandingan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana
  - Pengaturan Denda Pelaksanaan
  - Potensi Kelebihan Bayar Berdasar Hasil Audit
  - Retensi dalam Penanggulangan Bencana
  - Kebutuhan PHO Parsial dalam Penanggulangan Bencana

# BAB 6

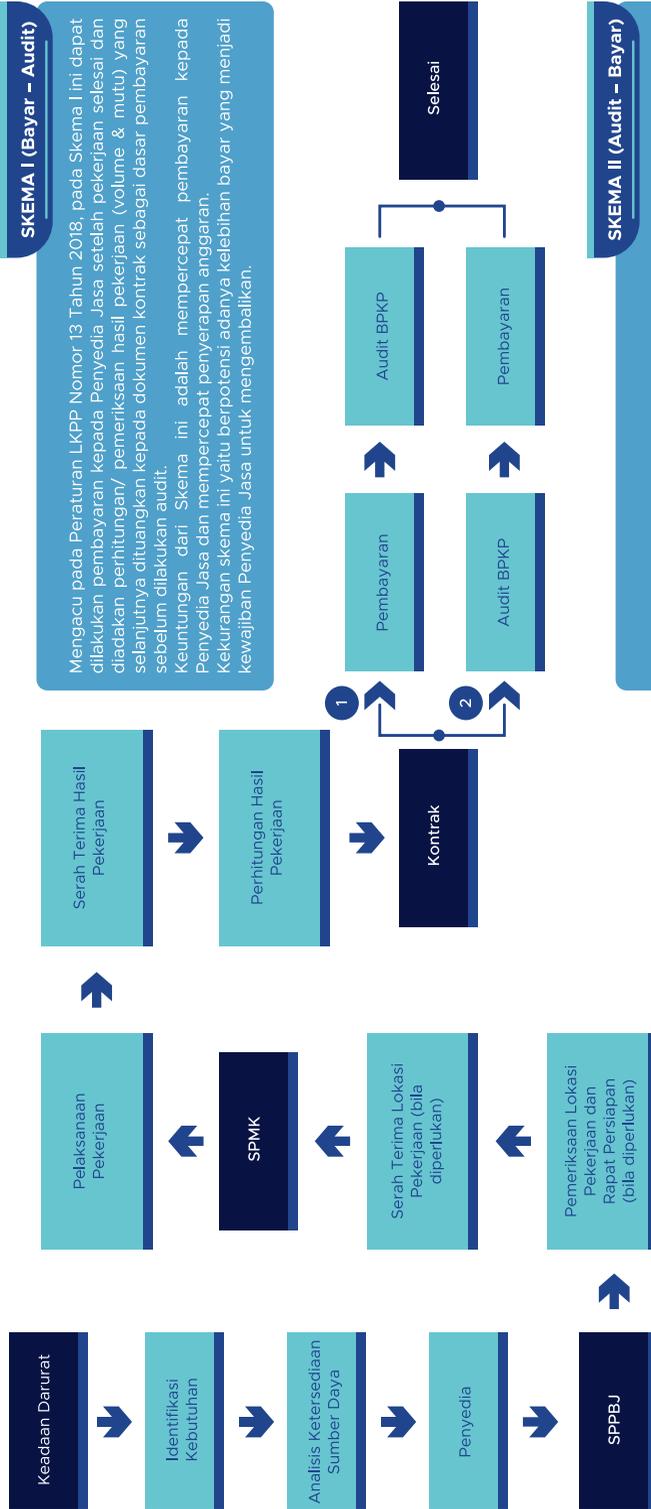
---

*Good Governance:*

Ketentuan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/  
Jasa dan Anggaran Penanganan Bencana

**“Meskipun dalam keadaan darurat atau bencana, tertib administrasi dan akuntabilitas harus tetap dijalankan.”**

Belajar dari penanganan bencana siklon tropis Seroja di Provinsi NTT dan NTB, terdapat 2 skema yang dapat dilakukan untuk proses pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yaitu Skema I (Bayar – Audit) atau Skema II (Audit – Bayar). Skema tersebut dapat menggambarkan sebagai berikut:



**SKEMA I (Bayar – Audit)**

Mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, pada Skema I ini dapat dilakukan pembayaran kepada Penyedia Jasa setelah pekerjaan selesai dan diadakan perhitungan/ pemeriksaan hasil pekerjaan (volume & mutu) yang selanjutnya dituangkan kepada dokumen kontrak sebagai dasar pembayaran sebelum dilakukan audit.

Keuntungan dari Skema ini adalah mempercepat pembayaran kepada Penyedia Jasa dan mempercepat penyerapan anggaran. Kekurangan skema ini yaitu berpotensi adanya kelebihan bayar yang menjadi kewajiban Penyedia Jasa untuk mengembalikan.

**SKEMA II (Audit – Bayar)**

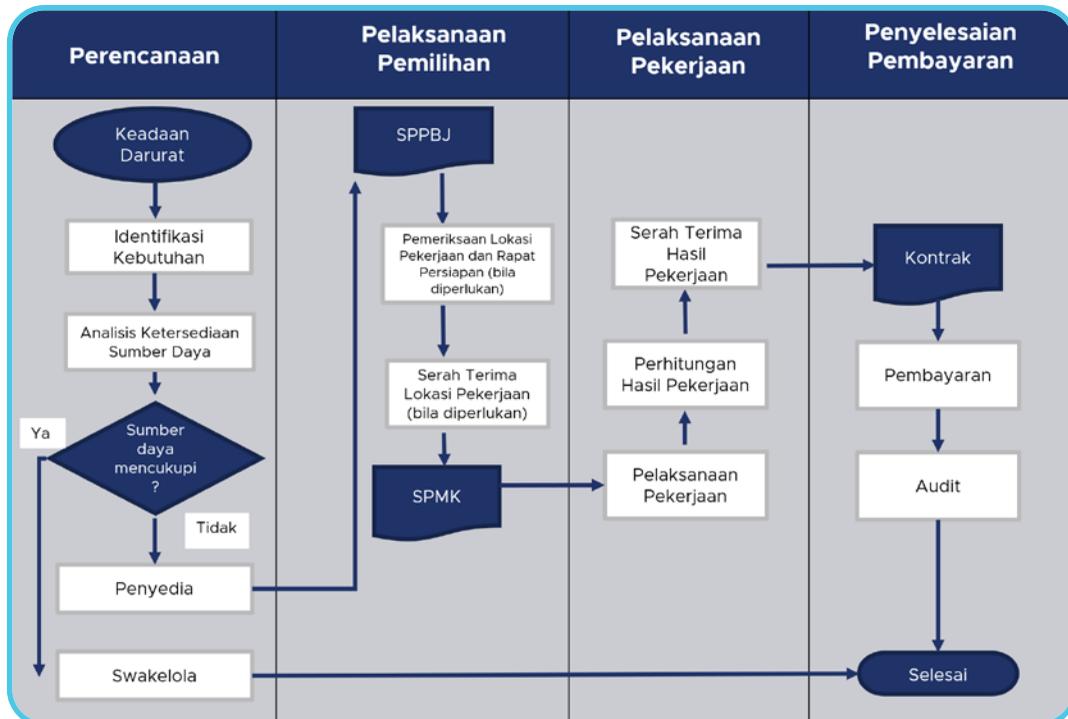
Skema ini merupakan adaptasi dari Skema I, untuk memastikan bahwa pembayaran yang akan diberikan ke penyedia jasa berdasar hasil audit yang memastikan kesesuaian pelaksanaan lapangan (volume & mutu) yang dituangkan kedalam kontrak sebagai dasar pembayaran kepada Penyedia Jasa. Keuntungan dari penerapan Skema II adalah Satker dan Penyedia Jasa lebih secure dari potensi temuan pengembalian kelebihan bayar.

**Klaster Pembagian Tugas Penanganan Bencana Alam Seroja Berbasis Wilayah**

## A Tahapan PBJ Penanganan Keadaan Darurat

Mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, pengadaan barang/jasa

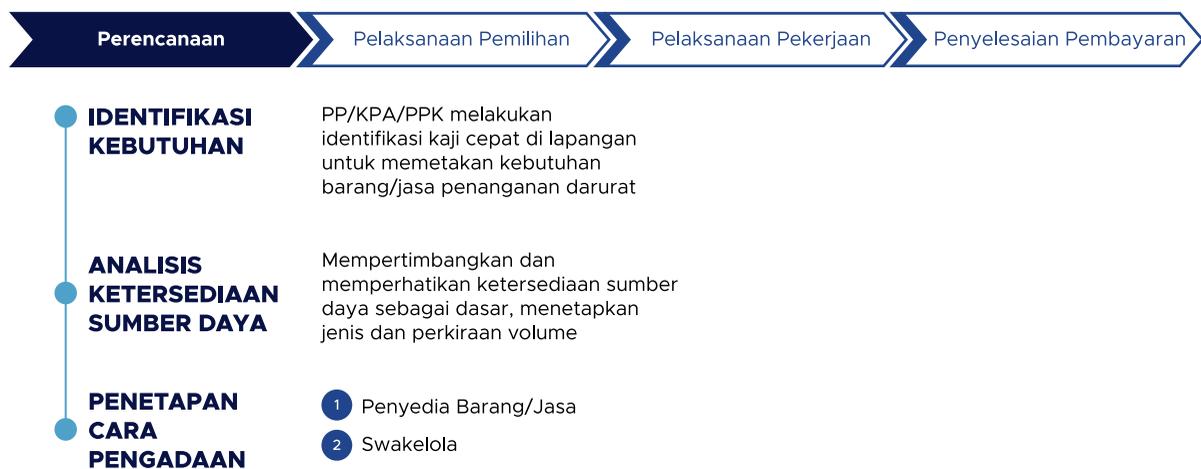
terbagi menjadi 4 tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pekerjaan, dan penyelesaian pembayaran yang tergambar dalam bagan alir sebagai berikut:



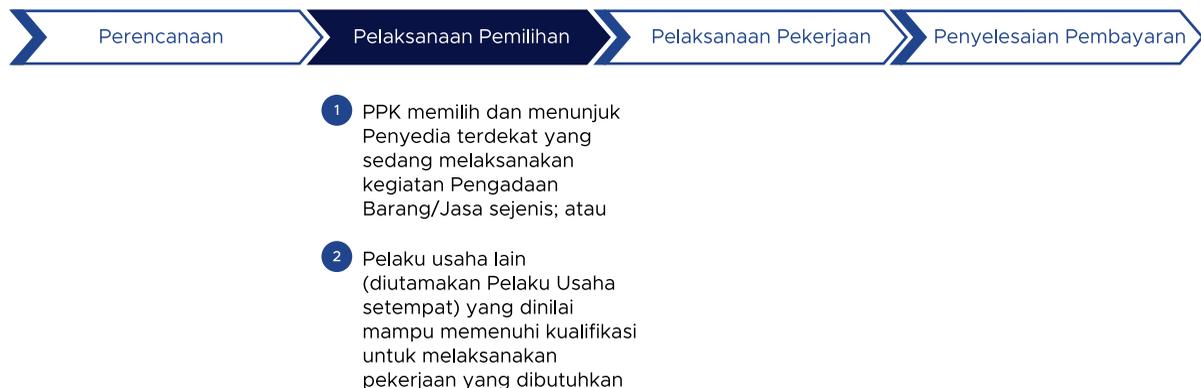


Berikut detail kegiatan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa penanganan keadaan darurat:

#### TAHAPAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA PENANGANAN KEADAAN DARURAT



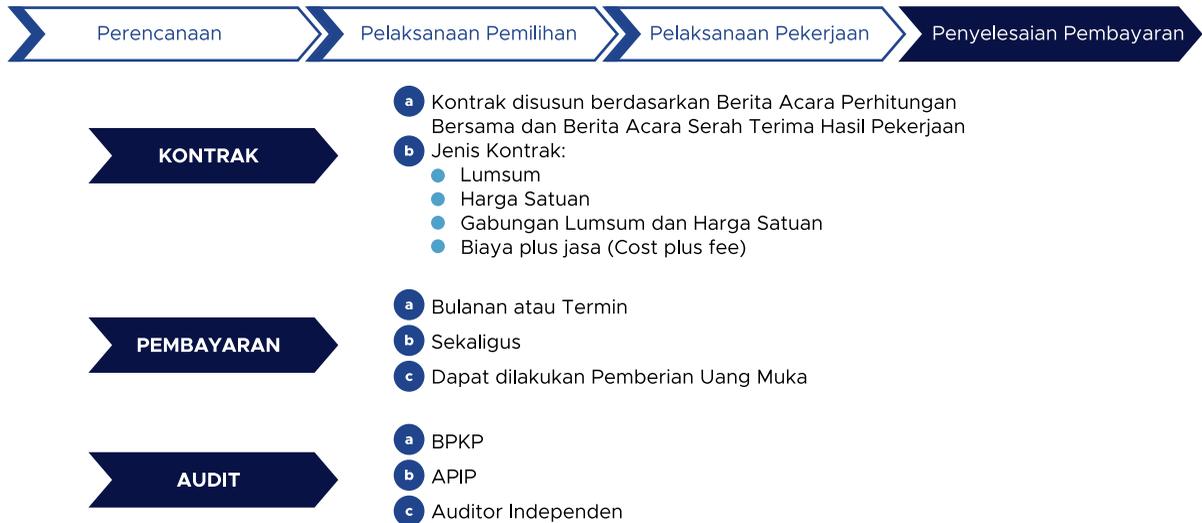
#### TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/ JASA PENANGANAN KEADAAN DARURAT



### TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/ JASA PENANGANAN KEADAAN DARURAT



### TAHAPAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/ JASA PENANGANAN KEADAAN DARURAT



## B Jenis Anggaran dalam Penanganan Bencana

Terdapat beberapa jenis anggaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tanggap darurat, diantaranya:

### Anggaran Dana Tanggap Darurat Tahun Berjalan Unit Organisasi

- **SDA:** Melalui dana tanggap darurat bencana yang difasilitasi di setiap Satker Operasi dan Pemeliharaan
- **BM:** Melalui dana fasilitasi penanggulangan darurat akibat bencana (Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat/PMTD)
- **CK:** Melalui dana infrastruktur tanggap darurat di setiap Balai Prasarana Permukiman Wilayah
- **Perumahan:** Melalui dana dukungan perumahan tanggap darurat bencana di Sekretariat Direktorat

### Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

- Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai

### Sisa Anggaran/Sisa Lelang Kementerian – Revisi DIPA Tahun Berjalan

- PMK Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (mengganti PMK Nomor 208/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2021)

### Mekanisme Penyediaan dan Pembayaran Anggaran Bencana

- Alokasi anggaran tiap tahun disesuaikan dengan rencana waktu pelaksanaan konstruksi setiap tahunnya, realisasi pembayaran berdasarkan realisasi kemajuan konstruksi setiap tahunnya.
- Pekerjaan yang telah selesai dan dituangkan dalam kontrak, namun alokasi anggaran belum mencukupi akan menjadi tunggakan pembayaran tahun berikutnya (mengikuti PMK Nomor 62 Tahun 2023).

## C Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran

Tata cara pelaksanaan pembayaran dalam penanganan bencana dapat dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu:

- a. Mekanisme Pembayaran melalui SPM LS Non Kontraktual untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PIRUADI PRAPTOSUHARDJO III, JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710; TELEPON: 021-3449230  
 INTERN 5660, (021) 3849670; FAKSIMILE (021) 3849670; LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

---

NOTA DINAS  
 NOMOR ND-14/PB.7/2022

Yth : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat  
 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mamuju  
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kupang

Dari : Direktur Sistem Perbendaharaan

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Penyelesaian Pekerjaan Dalam Rangka Penanganan Kondisi Darurat dan Bencana Badai Seroja Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir TA 2021 dan Akan Dilanjutkan Penyelesaiannya Pada TA 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

---

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat Nomor ND-945/WPB.26/2021 tanggal 24 Desember 2021 dan nota dinas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ND-1/WPB.24/2022 tanggal 1 Januari 2022, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Pekerjaan dalam rangka penanganan kondisi darurat dan bencana Badai Seroja pada prinsipnya merupakan pekerjaan kontraktual namun pengajuan pembayarannya dilakukan melalui SPM LS Non Kontraktual karena data kontrak pekerjaan dimaksud tidak dapat didaftarkan ke KPPN.

Belajar dari penanganan keadaan darurat NTT, pada prinsipnya penanganan keadaan darurat merupakan pekerjaan kontraktual yang dilaksanakan berdasarkan SPMK (Belum ada kontraknya), sehingga pengajuan pembayarannya dilakukan melalui mekanisme SPM LS Non Kontraktual.

Hal tersebut karena pekerjaan darurat dibedakan dari pekerjaan kontraktual biasa yang memerlukan penyusunan Kartu Pengawasan Kontrak sebagai dasar dalam melakukan pengujian kesesuaian tagihan (SPM) pada aplikasi OMSPAN.

“Pekerjaan dalam rangka penanganan kondisi darurat dan bencana Badai Seroja pada PRINSIPNYA merupakan PEKERJAAN KONTRAKTUAL namun pengajuan PEMBAYARANNYA dilakukan melalui SPM LS NON KONTRAKTUAL karena data kontrak pekerjaan dimaksud tidak dapat didaftarkan ke KPPN”.

## b. Mekanisme Pembayaran melalui Swakelola untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri

### Mekanisme Pembayaran melalui Swakelola

Aturan dalam penggunaan dana tanggap darurat melalui kegiatan swakelola yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) maupun Unit Organisasi (Unor) mengikuti:

1. Surat Edaran Menteri PUPR No. 10/SE/M/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian PUPR
2. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian PUPR No. 16/SE/IJ/2017 Tentang Prosedur Pelaksanaan Review Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak di Kementerian PUPR

Tabel Pagu Anggaran Penanganan Keadaan Darurat Unit Organisasi Tahun 2021

Unit Organisasi	Rincian Output (RO)	Pagu Anggaran
Sumber Daya Air	Tanggap Darurat Bencana	Rp1.203.658.285.000
Bina Marga	Fasilitasi Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Rp363.040.000.000
Cipta Karya	Infrastruktur Tanggap Darurat	Rp131.586.297.000
Perumahan	Dukungan Perumahan Tanggap Darurat Bencana	Rp6.590.670.000

## D Perbandingan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan tertentu, pelaksanaan penanggulangan bencana dapat

dibedakan berdasarkan status keadaannya, yaitu:

- a. Tanggap Darurat dan Masa Transisi Menuju Pemulihan; dan
- b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Perbandingan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan dapat tergambar sebagai berikut:

Status Keadaan	Pelaksanaan	Desain	Anggaran	Waktu Pelaksanaan	Pembayaran	Denda Pelaksanaan
<b>Tanggap Darurat &amp; Masa Transisi Menuju Pemulihan</b>	Berdasarkan penugasan, belum memiliki kontrak	<i>Basic Design/Darurat</i>	belum pasti, masih berdasarkan RAB Perkiraan	Sesuai dengan Perkiraan Penyelesaian	Diatur dalam SPMK, dapat dilakukan secara: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bulanan;</li> <li>• Termin;</li> <li>• Sekaligus;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per. LKPP Nomor 13 Tahun 2018 =&gt; Ketentuan tentang sanksi kepada Penyedia (apabila diperlukan)</li> <li>• SE Menteri PUPR 17 Thn 2021 =&gt; denda/ganti rugi (Tidak dipersyaratkan)</li> </ul>
<b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	Mengikuti pelaksanaan kontrak normal	Mengikuti desain jadi (konstruksi permanen)	Berdasarkan anggaran dalam kontrak	Sesuai dengan waktu dalam kontrak	Diatur dalam kontrak	Ada & diatur dalam kontrak

## E Pengaturan Denda Pelaksanaan

Mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 17/SE/M/2021, klausul pengenaan denda terhadap penugasan penyedia jasa berbunyi Denda/ Ganti Rugi Tidak Dipersyaratkan, dengan pertimbangan antara lain:

- a. Penunjukan Penyedia Jasa merupakan kerja sama antara Pemerintah dan Penyedia Jasa yang bersifat penugasan (kepada BUMN) dalam penanganan bencana pada masa Tanggap Darurat & Masa Transisi Menuju Pemulihan

- b. Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan skema pre-financing oleh Penyedia Jasa karena pada umumnya anggaran belum teralokasi sepenuhnya / atau baru teralokasi sebagian kecil
- c. Memerlukan fleksibilitas waktu pelaksanaan karena lingkup pekerjaan masih bersifat perkiraan berdasar Basic Design/Darurat sehingga Volume dan Spesifikasi serta kebutuhan waktu penyelesaian pekerjaan belum pasti.

Mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 17/SE/M/2021, klausul pengenaan denda terhadap penugasan penyedia jasa berbunyi Denda/ Ganti Rugi Tidak Dipersyaratkan, Karena kerja sama antara Pemerintah dan Penyedia Jasa dalam penanganan bencana pada masa Tanggap Darurat & Masa Transisi Menuju Pemulihan memerlukan fleksibilitas waktu pelaksanaan karena lingkup pekerjaan masih bersifat perkiraan berdasar *Basic Design*/Darurat sehingga Volume & Spesifikasi belum pasti.

### Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018

- Mengacu poin 2.2.1 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), disebutkan pada huruf g. ketentuan tentang sanksi kepada Penyedia APABILA DIPERLUKAN.
- Mengacu poin 2.2.4 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), disebutkan: PPK menerbitkan SPMK sebagai dokumen pra-kontrak kepada Penyedia yang didalamnya mencantumkan antara lain hal sebagai berikut: butir g. HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU TERMASUK SANKSI.

### Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 17/SE/M/2021

- Mengacu contoh format Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), disebutkan pada poin 10. DENDA/GANTI RUGI: TIDAK DIPERSYARHTKAN

## F Potensi Kelebihan Bayar Berdasar Hasil Audit

Belajar dari penanganan bencana siklon tropis Seroja di Provinsi NTT dan NTB, terdapat 2 skema yang dapat dilakukan untuk proses pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yaitu Skema I (Bayar – Audit) atau Skema II (Audit – Bayar). Skema tersebut dapat tergambar sebagai berikut:

Terdapat 2 skema yang dapat dilakukan untuk proses pembayaran pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yaitu:

- Skema I** : Dilakukan pembayaran terlebih dahulu lalu dilakukan audit
- Skema II** : Dilakukan Audit setelah serah terima pekerjaan selesai sebagai dasar pembayaran pekerjaan

Belajar dari penanganan bencana siklon tropis Seroja di Provinsi NTT dan NTB, pelaksanaan pembayaran menggunakan skema I akan menimbulkan potensi kelebihan pembayaran berdasarkan hasil audit BPKP. Hal ini disebabkan antara lain :

- Realisasi pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan pada harga pasar pada saat kejadian bencana sehingga harganya di atas harga normal;

- b. Audit mengacu pada harga dasar resmi yang ditetapkan Kepala Daerah pada kondisi normal;
- c. Metode pelaksanaan pada masa tanggap darurat bencana/masa transisi menuju pemulihan berbeda dengan pelaksanaan pekerjaan pada kondisi normal.

Sebagai pencegahan terjadinya kembali kondisi tersebut di atas direkomendasikan penerbitan payung hukum dari pihak berwenang (Kepala Daerah) Untuk Menetapkan “Harga Wajar” Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Atau Masa Transisi Menuju Pemulihan.

Potensi terjadinya kelebihan bayar disebabkan karena perbedaan harga dasar (Upah, Bahan Baku/Material, Peralatan) termasuk perbedaan Metode Pelaksanaan, yaitu:

- 1 Realisasi pembayaran pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada harga dasar pasar pada saat kejadian bencana (diatas harga normal)
- 2 Audit mengacu pada harga dasar resmi yang ditetapkan Kepala Daerah pada kondisi normal.
- 3 Metode pelaksanaan pada masa tanggap darurat bencana / masa transisi menuju pemulihan juga berbeda dengan pelaksanaan pekerjaan pada kondisi normal

### Upah Pekerja di Lapangan, Bahan/Material dan Peralatan

- Mengacu pada temuan hasil audit BPKP, terdapat kelebihan pembayaran akibat ketidakwajaran Harga Satuan Dasar (HSD) dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). Hal ini disebabkan:
  - Kebutuhan pekerja ahli dan terampil kebanyakan berada di wilayah pulau Jawa
  - Bahan baku/material dan peralatan kebanyakan dipasok dari luar pulau NTT
  - Masih dalam kondisi penyebaran COVID-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
  - Vaksin COVID-19 sebagai syarat perjalanan luar kota/provinsi
  - Terdapat kenaikan biaya tiket pesawat/kendaraan umum lainnya akibat PSBB
  - Terdapat kenaikan biaya kirim dan pembatasan jadwal pengiriman
  - Dasar aturan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam pembayaran upah pekerja, bahan baku dan peralatan masih menggunakan dasar aturan yang disusun untuk keadaan/kondisi normal (bukan *force majeure*)

#### Rekomendasi :

Perlu Penerbitan Payung Hukum Dari Pihak Berwenang (Kepala Daerah) Untuk Menetapkan “Harga Wajar” Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Atau Masa Transisi Menuju Pemulihan.

## G Retensi dalam Penanggulangan

Adanya potensi kelebihan pembayaran berdasarkan hasil audit BPKP dalam pembayaran menggunakan skema I tersebut di atas, dapat diminimalisir

dengan menambah besaran retensi pembayaran disamping retensi pemeliharaan sebesar 5%.

Mengacu pada pelaksanaan penanggulangan bencana yang telah dilakukan di NTT dan NTB, penerapan retensi mengikuti ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan SE Menteri PUPR No. 17/SE/M/2021.

### Ketentuan pemotongan dan pembayaran retensi

- Pasal 53 Perpres No. 16 Tahun 2018, menyebutkan besaran retensi adalah sebesar 5% dan digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan.
- SE Menteri PUPR No. 17/SE/M/2021 Huruf E angka 10, menyatakan bahwa besaran retensi untuk pekerjaan konstruksi terdiri:
  - a Besaran untuk retensi masa pemeliharaan dengan besaran maksimal 5%; dan/atau
  - b Besaran selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai retensi untuk mengantisipasi potensi kelebihan pembayaran

#### Rekomendasi :

Mengacu pada kedua aturan di atas, dapat disimpulkan bahwa besaran retensi untuk pekerjaan konstruksi selain dikenakan sebesar 5%, dapat ditambah besaran retensi untuk antisipasi potensi kelebihan pembayaran.



## F

### Potensi Kelebihan Bayar Berdasar Hasil Audit

Pada pekerjaan regular (kondisi normal), serah terima hasil pekerjaan mengikuti progres pekerjaan yang telah selesai dan mengacu pada pengaturan dalam kontrak.

Sedangkan pada pelaksanaan pekerjaan penanganan bencana pada masa tanggap darurat/masa transisi menuju pemulihan, Serah terima hasil pekerjaan mengikuti progres pekerjaan yang telah selesai dan mengacu pada pengaturan dalam SPMK.

Dalam rangka menjaga kecepatan penyelesaian pekerjaan di lapangan, perlu didukung dengan kemampuan finansial penyedia jasa yang dibayar setelah pekerjaan selesai. Oleh karenanya belajar dari pelaksanaan penanggulangan bencana NTT NTB, perlu fasilitasi pengaturan sistem PHO Parsial di dalam SPMK sehingga sebagian pekerjaan yang sudah selesai dan berfungsi dapat dituangkan di dalam Kontrak sebagai dasar serah terima pekerjaan sebagian (PHO Parsial), yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pembayaran sesuai dengan progres.

#### PHO parsial dapat dilakukan jika pekerjaan yang akan diserahkan telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Pekerjaan tersebut telah selesai sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar rencana yang telah disetujui.
- Pekerjaan tersebut telah dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa.
- Pekerjaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak.

#### PHO parsial memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- Penyedia jasa dapat menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diserahkan.
- Pengguna jasa dapat memanfaatkan pekerjaan yang telah diserahkan.
- Risiko atas pekerjaan yang telah diserahkan beralih dari penyedia jasa kepada pengguna jasa.

# 07



***Good Delivery:***  
***Peran Pendampingan Inspektorat Jenderal,  
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Pusat  
Data dan Teknologi Informasi serta  
Audit Badan Pengawasan Keuangan dan  
Pembangunan (BPKP)***

- 
- Peran Inspektorat Jenderal, Bina Konstruksi, dan BPKP
  - Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian

# BAB 7

## *Good Delivery:*

Peran Pendampingan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Pusat Data dan Teknologi Informasi serta Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

### **A** Peran Inspektorat Jenderal, Bina Konstruksi

Salah satu pembelajaran dari penanganan bencana siklon tropis Seroja di Provinsi NTT dan NTB adalah memaksimalkan fungsi assurance dan fungsi consulting yang dimiliki oleh berbagai Unit Organisasi yang memiliki kewenangan tersebut yang dapat tergambar sebagai berikut:

#### FUNGSI ASSURANCE

##### **Audit (oleh BPKP)**

Audit Pembayaran Hasil Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam oleh BPKP

##### **Reviu (oleh Itjen)**

- 1 Reviu Usulan Penggunaan Dana Tanggap Darurat & Penanganan Mendesak
- 2 Reviu Usulan Revisi Anggaran (penyediaan anggaran penanggulangan bencana)
- 3 Koordinasi Audit Pembayaran dengan BPKP

#### FUNGSI CONSULTING

**Pendampingan Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam (oleh Itjen dan Ditjen Bina Konstruksi) pada tahap:**

- 1 Perencanaan
- 2 Pemilihan Penyedia
- 3 Pelaksanaan Pekerjaan (SPPBJ, SPMK, Kontrak, Pengenaan Sanksi/Denda, dan Pembayaran)
- 4 Administrasi Pertanggungjawaban Hasil Pekerjaan (Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen)

Peran pendampingan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui fungsi consulting untuk menjaga ketaatan tata kelola penyelenggaraan kegiatan pada setiap tahapan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban/ pelaporan penanganan bencana siklon tropis Seroja di Provinsi NTT dan banjir bandang di Provinsi NTB. Tugas dan aktivitas pendampingan pada setiap tahapan tergambar sebagai berikut:

**AKTIVITAS PENDAMPINGAN**

**TIM PENDAMPINGAN**  
**Tugas:**

- A** Pendampingan/asistensi & konsultasi Tata Kelola Penyelenggaraan Kegiatan Penanggulangan Bencana oleh Kementerian PUPR
- B** Pendampingan Administrasi & Teknis Pelaksanaan Paket Pekerjaan dan Barang Milik Negara Kementerian PUPR yang terdampak bencana

- 1 Tahap Persiapan**
  - a Identifikasi Risiko ➤ Daftar Simak Unor Pelaksana
  - b Koordinasi Pengawasan dengan BPKP (bagi tugas Pendampingan & Audit)
- 2 Tahap Pelaksanaan**
  - a Konsultasi/Asistensi ➤ Klinik/Posko Konsultasi
  - b Pendampingan Administrasi & Teknis Hasil Pelaksanaan Pekerjaan & BMN yang terdampak Bencana
- 3 Tahap Pertanggung Jawaban/Pelaporan**
  - a Daftar Simak pemenuhan kelengkapan administrasi PBJ Darurat (perencanaan s.d pembayaran)
  - b Daftar Simak pemenuhan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban biaya operasional



*Koordinasi dengan BPKP Perwakilan NTT dalam rangka koordinasi pelaksanaan pendampingan oleh Itjen dan persiapan audit pembayaran oleh BPKP*



*Pendampingan di Prov. NTT dalam rangka pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen PBJ*



Pelaksanaan Klinik Konsultasi secara online Balai/Satker/PPK NTT dan NTB dengan Itjen dan Ditjen Bina Konstruksi



Rapat Pendampingan Itjen dan Ditjen Bina Konstruksi dalam rangka menyamakan pemahaman atas peraturan PBJ

## B Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Salah satu upaya terpenting dalam mewujudkan good delivery pelaksanaan penanganan bencana siklon tropis Seroja di Provinsi NTT

dan banjir bandang di Provinsi NTB yaitu dengan memaksimalkan fungsi assurance dari BPKP melalui Audit Pembayaran baik melalui Skema I (Bayar – Audit) maupun Skema II (Audit – Bayar).

### PERAN BPKP PADA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM





08



**Belajar dari Bumi Nusa  
Tenggara**

- 
- An aerial photograph showing a road with a significant landslide. The road is paved and has yellow and white markings. A large area of the road has been covered by a landslide of earth and rocks. A yellow traffic cone is visible on the road near the landslide. The surrounding area is dry and hilly.
- Perencanaan (Planning)
  - Pengorganisasian (Organizing)
  - Pelaksanaan (Actuating)
  - Pasca Pelaksanaan (Controlling)

# BAB 8

## Belajar dari Bumi Nusa Tenggara

### 01 Waktu Pelaksanaan Penanganan Bencana vs Waktu Pelaksanaan Tahun Anggaran

Penyelesaian SPMK pelaksanaan penanganan bencana dimungkinkan selesai dalam tahun anggaran yang berjalan atau melampaui tahun anggaran, oleh karena itu kontrak dan pembayarannya dapat diatur sebagai berikut:

#### a. Selesai Dalam Tahun Anggaran Berjalan

Hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai (100%) dituangkan dalam kontrak tahun berjalan (Single Year Contract). Mekanisme pembayaran mengikuti PMK yang mengatur tentang Langkah-Langkah dalam Akhir Tahun Anggaran.

#### b. Selesai Melampaui Tahun Anggaran

Hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai (100%) dituangkan dalam kontrak tahun jamak (Multi Years Contract). Mekanisme pembayaran mengikuti PMK yang mengatur tentang Kontrak Tahun Jamak.



Selesai Dalam Tahun Anggaran Berjalan  
Selesai Melampaui Tahun Anggaran

## 02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Konstruksi Fisik vs Waktu Penugasan Konsultan Supervisi/MK

Pelaksanaan konstruksi penanganan bencana sering terjadi perubahan waktu (perpanjangan) yang berdampak kepada waktu penugasan Konsultan Supervisi/MK, berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa alternatif pelaksanaan kontrak Konsultan Supervisi/MK:

- a. Penyesuaian Waktu Kontrak Konsultan Supervisi/MK Tanpa Perubahan Nilai Kontrak  
Masa kontrak supervisi/MK mengikuti/menyesuaikan dengan rencana penyelesaian konstruksi fisik melalui pengaturan penugasan personal/man month (waktu dan jumlah penugasan personal), tanpa perubahan nilai kontrak konsultan.
- b. Tidak Ada Penyesuaian Waktu dan Nilai Kontrak Konsultan Supervisi/MK  
Pelaksanaan Supervisi/MK (Penugasan Personil/Man Month) waktu dan jumlah penugasannya sesuai kontrak, apabila pekerjaan pelaksanaan konstruksi belum selesai maka pengawasan dilanjutkan oleh tim direksi





## 03 Kewajaran harga upah dan bahan

- a. Pada kondisi normal, penentuan kewajaran harga upah, bahan dan peralatan dalam pelaksanaan audit salah satunya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pada kondisi bencana yang bersifat masif/berskala luas yang berdampak pada perekonomian, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang menyebabkan kenaikan harga di atas harga normal maka diperlukan payung hukum penetapan harga dasar upah, bahan, dan peralatan sesuai nilai pasar pada saat bencana (masa tanggap darurat/masa transisi).
- c. Perubahan penggunaan bahan, spesifikasi teknis, desain, dan lain sebagainya yang berdampak terhadap perubahan harga satuan harus didukung dengan analisa profesional (Justifikasi Teknis) yang memadai, serta ditindaklanjuti dengan negosiasi harga yang dituangkan di dalam dokumen Berita Acara.

## 04 Satu Data dan Informasi

- a. Bencana di Provinsi NTT dan Provinsi NTB yang mengakibatkan kerusakan yang masif dan tersebar diberbagai lokasi dengan akses yang sulit menjadi tantangan tersendiri di dalam pengumpulan data untuk pengambilan keputusan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, dibangun satu format dalam satu sistem pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian dan pelaporan data yang terintegrasi mulai dari tingkat Lapangan, Satker, Balai, sampai dengan Satgas, dan tingkat Pimpinan Kementerian PUPR.
- b. Pengintegrasian dan pengelolaan data dan informasi tersebut dikoordinasikan dengan baik oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kementerian PUPR sehingga dapat disajikan dengan cepat dan akurat karena hal ini menjadi kunci kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.
- c. Mengoptimalkan sumber daya peralatan, teknologi, dan peta-peta yang dimiliki oleh Pusdatin Kementerian PUPR untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, analisa data dan perencanaan.
- d. Pola ini dapat menjadi acuan di dalam penanganan bencana ke depan khususnya yang berskala besar dan tersebar.

## 05 Pengendalian Pelaksanaan

Salah satu kunci kecepatan penanganan infrastruktur terdampak bencana di Provinsi NTT dan NTB yang memiliki karakter Lokasi kepulauan yang tersebar dan sulit diakses adalah pengendalian pelaksanaan yang terorganisasi dengan baik dan terstruktur melalui:

- a. Organisasi Satgas yang baik memiliki komposisi tim yang lengkap, terdiri dari Ketua Satgas dibantu Tim Sekretariat, Tim Pengelolaan Data, Tim Pelaksana dari setiap Unit Organisasi, serta Tim Pendampingan Itjen dan Ditjen Bina Konstruksi dengan pembagian tugas dan kewenangan serta rentang kendali dan garis komando yang jelas.
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif dan terkoordinasi baik ditingkat Satgas, bidang-bidang, maupun di Tingkat Balai/ Satker sehingga kendala dan program penanganan dapat dilaksanakan secara cepat dan baik.
- c. Dilakukan monitoring lapangan secara intensif.

## 06 Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana

Negara Indonesia yang sering disebut sebagai “Supermarket” bencana menuntut kecepatan dan kompetensi dalam kesiap-siagaan menghadapi bencana, sejak pengumpulan/inventori data kerusakan infrastruktur terdampak sampai dengan penanganan dan pelaporan pertanggungjawaban. Belajar dari pengalaman penanganan bencana siklon tropis Seroja di Provinsi NTT dan Provinsi NTB, dan penanganan bencana di berbagai daerah direkomendasikan:

- a. Reviu penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi antara lain terkait pengorganisasian penanganan (kapan penanganan ditangani oleh Tim TRC Balai/Ditjen, kapan perlu dibentuk Satgas dan bagaimana strukturnya);
- b. Dibakukan Format Standar Inventori Pendataan Kerusakan Infrastruktur Terdampak pada setiap bidang atau Unit Organisasi;
- c. Pelatihan bagi Aparatur Pusat dan Daerah secara berkala untuk memberikan pemahaman yang sama tentang SOP, Format Inventori, dan Format Pelaporan dalam rangka kesiap-siagaan penanganan Bencana.

## 07 Penyiapan Lahan untuk Relokasi Permukiman

Salah satu kunci kecepatan dan keberhasilan relokasi permukiman korban terdampak bencana siklon tropis Seroja di Provinsi NTT dan Provinsi NTB adalah cepatnya didalam penyediaan lahan untuk relokasi. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam hal:

- a. Pemerintah Daerah memiliki bank tanah yang dapat dijadikan lahan relokasi permukiman;
- b. Peran Pemerintah Daerah di dalam penyediaan anggaran untuk ganti rugi lahan masyarakat yang akan digunakan untuk relokasi, serta komunikasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat pemilik lahan;
- c. Terdapat kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka program relokasi permukiman akibat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Kearifan masyarakat NTT yang rela menghibahkan tanahnya untuk digunakan dalam rangka relokasi permukiman bagi saudara-saudaranya yang terdampak bencana.

## 08 Pelibatan Masyarakat Terdampak Bencana

Dalam pelaksanaan pembangunan kembali infrastruktur yg terdampak bencana, sangat penting untuk melibatkan masyarakat didalamnya, dengan pertimbangan:

- a. Pada umumnya masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi NTT dan NTB mempunyai mata pencaharian dari berladang dan berkebun, yang kehidupan ekonominya terganggu akibat terjadinya bencana.
- b. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dalam bentuk apapun akan sangat membantu pemulihan ekonomi masyarakat setempat, disamping itu juga menimbulkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki terhadap pembangunan

## 09 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Lokal

Pengalaman penanganan bencana di Provinsi NTT dan NTB membutuhkan banyak tenaga kerja yang memiliki jenis dan tingkat keterampilan tertentu yang harus didatangkan dari luar pulau Nusa Tenggara (umumnya didatangkan dari pulau jawa) karena keterbatasan tenaga kerja setempat,

sehingga mengakibatkan biaya satuan pekerjaan menjadi lebih mahal. Oleh karena itu Kementerian PUPR perlu memprogramkan pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi setempat/lokal dalam rangka meningkatkan jumlah dan keterampilan tenaga kerja di luar pulau jawa, termasuk di Provinsi NTT dan NTB.



Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dalam bentuk apapun akan sangat membantu pemulihan ekonomi masyarakat setempat

## 10 Relokasi Permukiman yang Nyaman, Hijau dan

- a. Relokasi permukiman tidak sekedar memindahkan rumah warga namun membangun perumahan sebagai kawasan permukiman yang nyaman, hijau dan mempunyai corak arsitektural etnik budaya setempat. Disamping itu pembangunan relokasi permukiman juga menerapkan prinsip Build Back Better dengan membangun budaya baru yang lebih baik melalui beberapa pendekatan teknis antara lain sanitasi komunal, SPAM komunal, dan pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R.
- b. Untuk menciptakan lingkungan permukiman yang nyaman, maka perlu didukung dengan penghijauan yang terencana dan masif. Oleh karenanya, program penghijauan perlu diprogramkan dan dianggarkan sejak awal dan menjadi satu kesatuan dalam paket konstruksi (tidak hanya sebagai CSR dari penyedia jasa).



## 11 Komitmen Pengelolaan Pasca Konstruksi

Sebagian besar infrastruktur terdampak bencana termasuk relokasi permukiman, pengelolaan pasca konstruksi merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan penyiapan pengelolannya (operasi dan pemeliharaan) melalui:

- a. Kesepakatan serah terima kembali pengelolaan infrastruktur pasca konstruksi antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- b. Pembentukan lembaga pengelola dari desa atau masyarakat penghuni relokasi permukiman dalam rangka pengelolaan prasarana fasilitas sosial (rumah ibadah, balai desa, PAUD) dan fasilitas umum (SPAM komunal, sanitasi komunal, pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, penghijauan) di kawasan relokasi permukiman.

## 12 Tantangan Melahirkan Jawaban

Adanya gap aturan antara Perka LKPP No 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dengan Peraturan Keuangan, menjadi tantangan menghasilkan payung hukum yg menjembatani kedua ketentuan tsb. Melalui diskusi panjang Tim Satgas dg Tim Pendamping Itjen, Ditjen Binakon , dan pijak terkait al. LKPP, BPKP, Unsur Kemenkeu dll akhirnya melahirkan SE Menteri PUPR Nomor 17/SE/M/2021 tanggal 29 Oktober Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembayaran Pengadaan Jasa Konstruksi dalam Penanganan Keadaan Darurat di Kementerian PUPR yg menjadi solusi tdk hanya dalam penanganan bencana seroja di NTT - NTB , tapi menjadi panduan dalam penanganan bencana pada umumnya

## 13 Perempuan Tangguh PUPR

Penanganan bencana membuktikan bahwa PUPR kaya akan perempuan-perempuan tangguh.



**Ika Sri Rejeki, S.T., M.T.**  
Kabalai BPPW NTB



**Ir. Yusniewati, M.Sc.**  
Direktur Rumah Khusus



**Yublina Dila Bunga, S.T., M.T.**  
Kabalai BP2P NTT



**Rini Dyah**  
Kabalai BP2P NTB



**Septina Rachmawati, S.T., M.Sc.**  
Kasatker BPPW NTT



**Bernadeta Tea, S.ST., M.Si., M.T.**  
Kasatker PJPA BWS NTT



**Yasintha**  
PPK Air Minum BPPW NTT

## 14 Kepemimpinan yang Kuat



**Menangani Bencana dengan Tuntas  
Tanpa Menimbulkan “Bencana Lainnya”**

09



LAMPIRAN

- 
- Kata Mereka
  - Surat Edaran Nomor 17/SE/M/2021
  - Ucapan Terima Kasih dan Selamat Jalan
  - Hasil Audit BPKP
  - Dokumentasi Penanganan

# Kata Mereka



## **Ir. Bob Arthur Lambogia, M.Si**

Direktur Sungai dan Pantai Juni 2020 - Agustus 2023

Insan PUPR siap terjun ke lapangan dalam situasi dan kondisi apapun.



## **Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng.**

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Periode 2020 – 2023 Nusa Tenggara Timur

Terminologi bencana artinya adalah memberikan kerusakan, kerugian terhadap material, lingkungan maupun korban jiwa. Oleh sebab itu dalam penanganan bencana yang paling utama adalah kecepatan dalam mengurangi segala kerugian. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga melalui BPJN NTT berusaha untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan kecepatan yang diinginkan untuk mengurangi kerugian kerugian tersebut. Namun demikian terjadinya bencana Seroja tahun 2021 bersamaan dengan adanya Pandemi Covid-19 memberikan hambatan yang cukup besar kepada teman teman di lapangan.

Kami memberikan apresiasi yang besar kepada teman teman BPJN NTT dan juga rekan rekan dari BUMN yang mampu mengatasi halangan halangan ini. Sehingga apa yang kita inginkan untuk mengembalikan kondisi khususnya jalan dan jembatan di NTT akibat bencana Seroja bisa tercapai, walaupun masih ada kendala-kendala dalam penyelesaiannya. Oleh sebab itu penyelesaian penanganan bencana Seroja ini menjadi lesson learned untuk penanganan bencana selanjutnya.

Kepada masyarakat NTT, Pemda NTT, kita bersama-sama dapat menjaga apa yang sudah kita bangun, sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat NTT.



**Ir. Yusniewati, M.Sc.**  
Direktur Rumah Khusus, Ditjen Perumahan

Menjadi suatu kebanggaan bagi Direktorat Jenderal Perumahan, dipercaya sebagai bagian dari Tim Reaksi Cepat yang terlibat langsung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Provinsi NTT dan NTB. Cukup banyak pembelajaran yang kita peroleh dalam penanganan bencana ini. Banyak tantangan kami hadapi, namun tidak menyurutkan semangat kami untuk membantu pemulihan kehidupan masyarakat. Perlahan, satu persatu masalah terselesaikan tentunya berkat kerja sama dengan berbagai pihak. Semoga dengan terbangunnya Hunian Tetap ini, dapat memberikan manfaat dan harapan baru dalam mempercepat proses pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.



**Agustinus Junianto, S.T., M.T.**  
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  
Nusa Tenggara Timur

Terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang dengan cepat melakukan perbaikan dengan memberikan dana tanggap darurat untuk penanganan bencana alam Seroja. Meskipun mengalami beberapa kendala terkait lokasi penanganan dan pelaksanaan yang masih dalam situasi pandemi Covid-19, namun semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga jalan dan jembatan yang dibangun dibawah koordinasi Balai Jalan Nasional NTT semua dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada Penyedia Jasa yang telah bekerja maksimal, serta teman-teman satker dan PPK yang sudah dengan gigih mengawal pekerjaan di lapangan.

Semoga masyarakat dapat menikmati apa yang sudah dibangun oleh Pemerintah, dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat NTT.

# Kata Mereka



**Normansjah Wartabone, S.T., M.Si.**  
Kepala BPPW NTT – Januari 2024

Koordinasi antara balai dengan pemerintah daerah adalah hal pertama yang harus dikerjakan karena merekalah yang nanti akan menerima hasil perbaikan yang dilakukan. Selain itu, harus ada kesatuan data antara balai dengan pemerintah daerah.



**Ika Sri Rejeki, S.T., M.T.**  
Kepala BPPW NTB  
Juni 2020 – Januari 2024

Terima kasih kepada Pemerintah Daerah, Bapak Widiarto selaku Kasatgas kemudian Bapak Wahyu selaku Direktur PKP atas bimbingan dan arahnya Sehingga kegiatan relokasi pascabencana banjir di Kabupaten Dompu dan Bima ini dapat terselesaikan pada bulan Maret 2022. Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan serta saran terkait pembangunan relokasi ini.



**Yublina Dila Bunga, S.T., M.T.**

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II

Kerelaan dan dukungan dari masyarakat untuk berbagi atau merelakan lahannya untuk membantu saudara-saudaranya yang tertimpa musibah sangat berarti dalam mendukung penyelesaian dampak bencana. Namun masih banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur, dan baru tersentuh program pasca terjadi bencana alam. Untuk masyarakat di daerah terpencil, Pemerintah dapat memberikan program bantuan seperti BPS namun harus didukung juga dengan usulan dari Pemerintah Daerah.



**Septina Rachmawati, S.T., M.Sc.**

Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Timur, Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Dalam menangani bencana kita dipaksa untuk bisa bekerja sama tidak ego sektoral. Pada saat penanganan kita juga membutuhkan kerja sama antar instansi. Karenanya kita harus membangun empati bersama. Bencana sesungguhnya merekatkan kita semua. Dipertemukan oleh bencana dan tertempa, mempertemukan diri untuk bersama menertawakan derita.

# Kata Mereka



**Roy Marthen, S.T.**  
Kasatker Wilayah I, BPPW NTT

Saya bangga menjadi bagian dalam penanganan bencana ini dimana kami telah membangun kembali infrastruktur bidang keciptakaryaan yang rusak karena bencana. Semoga infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana.



**Ketsia Amelia Sonagrieth Lanoe, S.T., M.T.**  
Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur

Waktu itu kami masih di pengawasan. Kami bersyukur banyak ibu-ibu yang dilibatkan. Puji Tuhan, meskipun terjadi bencana, mungkin ini memang waktunya semua akses diperbaiki dan dibuka dan mereka sangat bersyukur.



**Naomi Sandang, S.T., M.T.**

Kepala Seksi Preservasi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur

Yang hebat adalah pemimpin kami yang bisa mengakomodir kami. Secara keseluruhan di NTT maupun NTB sulit dijangkau dan waktu itu semua balai dikumpulkan termasuk semua pihak yang terkait. Manakala jalan berhasil dibuka, masyarakat sangat bersyukur. Kami terima kasih kepada para pemimpin.



**Bernadeta Tea, S.ST., M.Si., M.T.**

Kepala Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara II Provinsi Nusa Tenggara Timur, BWS Nusa Tenggara II Kupang

Dalam kejadian bencana, perasaan awal yang dirasakan diantaranya bingung dan galau karena bencana merupakan hal yang tak terduga serta terjadi secara tiba-tiba. Namun, akan menghasilkan kepuasan tersendiri ketika berbagai hal dapat dilalui dengan baik.

# Kata Mereka



## **Lasmi, S.T., M.Si.**

PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA IV,  
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air  
Nusa Tenggara II, Balai Wilayah Sungai Nusa  
Tenggara II Kupang

Suatu kejadian yang dahsyat perlu ditindaklanjuti dengan cepat. Kita perlu kesiapan yang lebih matang karena negara kita rawan bencana baik geologis maupun klimatologis.



## **Nahason Hariandja, S.T., M.T.**

Teknik Pengairan Ahli Muda Operasi dan  
Pemeliharaan SDA Nusa Tenggara II, BWS  
Nusa Tenggara II Kupang

Dengan Visi Misi PUPR: Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat benar benar diterapkan saat terjadinya Bencana SEROJA 2021, walaupun didera dalam Bencana Dunia COVID 19, penanganan bencana Seroja a.l Penyediaan Air Baku dapat dilaksanakan berkat arahan yang gigih dari Pak Kasatgas. Ir. Widiarto, Sp.1. Kiranya kelak kekompakan dan kebersamaan senantiasa di pupuk untuk PUPR, sehingga segala sesuatunya dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran demi masyarakat yang membutuhkan bantuan Pemerintah. Dengan semboyan “ NEGARA HADIR UNTUK RAKYAT”



**Johnny Manisa**

Pengelola Kepegawaian BWS Nusa Tenggara II, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang

Terkait penanggulangan bencana yang terjadi di NTT, kami sangat siap dalam menangani dan membantu masyarakat. Harapannya, ke depan Pemda juga ada unit reaksi cepat, anggaran, posko bencana, administrasi, dan pengetahuan akan apa saja yang harus dilakukan.



**Irwan Ahmad Sugiharto, S.Kom.,M.T.**

Surveyor Pemetaan Ahli Muda Bidang Bidang Data dan Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi

Ikut terlibat perjalanan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana Badai Siklon Seroja di NTT dan NTB merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk diri saya. Saya banyak belajar mengenai manajemen bencana dari Kasatgas. Selain itu penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi berbagi pakai sangat membantu penyebaran informasi tentang kondisi lapangan serta progres pembangunan rehab rekon. PUPR Sigap Membangun Negeri.

# Kata Mereka



**Korinus Masneno**  
Bupati Kupang

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang dan masyarakat penerima bantuan rumah layak huni, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan semua lini yang turut memberikan sumbangsih atas pembangunan hunian tetap Pasca Bencana Siklon Seroja, terutama kepada Kasatgaslak Penanggulangan Bencana di NTT dan NTB beserta jajarannya serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II yang telah bekerja keras membangun Hunian Tetap di Desa Saukibe dan Desa Bokong Kabupaten Kupang. Bantuan ini merupakan jawaban kebutuhan rumah layak huni bebas bencana dan sekaligus menjadi lokasi pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Teruslah berkarya membangun negeri.



**Agasi**  
Project Manager Bendung Mena - PT Waskita

Ikut berperan aktif dalam penanganan infrastruktur pasca bencana alam merupakan pengalaman yang mengesankan. Pekerjaan harus dilakukan secepat dan sebaik mungkin ditengah kondisi yang terbatas agar infrastruktur dapat digunakan kembali oleh masyarakat terdampak.



**Felix Lubis**  
PT. Wijaya Karya

Dengan Semangat AHKLAK dan demi membantu masyarakat yang terdampak bencana, dengan koordinasi yang sangat baik dari Tim PUPR dan konsultan, saya sangat Bangga dipercaya mendapat tugas untuk mengkoordinir tim WIKA dalam pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat di NTT khususnya area Malaka dan Belu



**Santalia**  
Yodya Karya

Kami selaku insan Yodya Karya, mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Menteri PUPR dan bapak Kasatgas Bencana NTT-NTB atas kepercayaan yang sangat besar kepada kami untuk menjadi salah satu mitra PUPR dalam melaksanakan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana infrastruktur Jalan, Jembatan, sarana hunian dan permukiman, sarana prasarana lainnya yang terdampak Bencana Seroja di provinsi NTT-NTB.

Kami juga bangga sebagai mitra PUPR, kami dapat bersinergi bersama-sama ,bergerak cepat, dan bertindak tepat guna dalam penanganan bencana , sesuai dengan motto Yodya Karya “Come with Solution”.



### Rafdi Azra

Project Manager PT. Brantas Abipraya

Kekompakan semua pihak baik dari Kementerian PUPR, Pemprof dan Pemda serta penyedia jasa (konsultan MK dan kontraktor) dalam penanganan sangat terlihat jelas, dengan lokasi penanganan yang tersebar di beberapa pulau di NTT dan NTB semua dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan hasil yang bagus serta sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama yang terdampak. "Bravo tim tanggap NTT-NTB!"



### Aulia Biben S

Kantor Staf Presiden

Terima kasih atas kerja sama pak Widi. Beliau yang sangat memahami permasalahan hingga paling kecil dan teknis. Dengan jam terbang, beliau pun mampu memberikan solusi yang achievable. Beliau yang humble bahkan saat berinteraksi dengan saya yang masih muda. Saya belajar banyak dari beliau. Selamat menikmati babak baru pak. Sehat selalu!



**Tatya Koeswanto**  
Kantor Staf Presiden

Selamat menjalani petualangan purna tugas, Pak Widi! Sangat senang dan bangga bisa belajar langsung dari Bapak Widi saat penanganan bencana Seroja dgn penanganan yang tanggap dan tepat sasaran. Sehat dan bahagia selalu bersama orang-orang yang disayanginya, Pak Widi!



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta 12110 Telepon (021) 7262805 - Faksimile (021) 7203962

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR: 351.1 /KPTS/SJ/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperlukan upaya penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4824);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

3. Keputusan Presiden Nomor 195/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2008 tentang Petunjuk Teknis Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Rehabilitasi/Rekonstruksi pada Tahap Bencana di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut dengan Satgas PPB di Provinsi NTT dan Provinsi NTB dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satgas PPB di Provinsi NTT dan Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Ketua Satuan Tugas Pelaksana;
2. Tim Koordinasi Pendampingan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
3. Tim Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Koordinator Tim Sekretariat;
  - b. Tim Bidang Manajemen Data, Informasi, Pelaporan, dan Hubungan Masyarakat;
  - c. Tim Koordinasi Transportasi; dan
  - d. Tim Operasional Kesekretariatan;
4. Tim Pelaksana, terdiri atas:
  - a. Tim Bidang Sumber Daya Air;
  - b. Tim Bidang Bina Marga;
  - c. Tim Bidang Cipta Karya; dan
  - d. Tim Bidang Perumahan.

KETIGA : Satgas PPB di Provinsi NTT dan Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua Satuan Tugas Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan komando dan koordinasi kegiatan seluruh unsur pelaksana Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara

- Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di lokasi bencana;
- b. mewakili Pusat Komando dalam koordinasi kerja dengan unsur komando BNPB dan/atau BPBD serta instansi terkait lainnya di wilayah bencana;
  - c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Pusat Komando;
  - d. mengoordinasikan penyelenggaraan pendampingan (pengawasan lainnya) oleh Tim Inspektorat Jenderal;
  - e. mengoordinasikan pendampingan oleh Tim Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
  - f. berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan kegiatan penanggulangan bencana;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah selaku Koordinator Siaga Bencana di lokasi terdampak bencana; dan
  - h. melaporkan kegiatan penanggulangan bencana kepada:
    - 1) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    - 2) Wakil Menteri PUPR selaku Ketua Satgas PPB PUPR;
    - 3) Pimpinan Unit Organisasi selaku Wakil Ketua Satgas PPB PUPR; dan
    - 4) Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan PUPR selaku Ketua Harian Satgas PPB PUPR.
2. Tim Koordinasi Pendampingan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan (pengawasan lainnya) terhadap penanggulangan bencana; dan

- b. mengoordinasikan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa dalam penanggulangan bencana agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tim Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Koordinator Tim Sekretariat membantu Ketua Satuan Tugas Pelaksana dalam:
    - 1) menyelenggarakan kesekretariatan Satuan Tugas;
    - 2) melaksanakan koordinasi Tim Bidang Manajemen Data, Informasi, Pelaporan, dan Hubungan Masyarakat, Tim Koordinasi Transportasi, dan Tim Operasional Kesekretariatan;
    - 3) mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan;
    - 4) melaksanakan koordinasi dengan Ketua Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana.
  - b. Tim Bidang Manajemen Data, Informasi, Pelaporan, dan Hubungan Masyarakat membantu Ketua Satuan Tugas Pelaksana dalam:
    - 1) menyelenggarakan sistem data, informasi dan pelaporan berbasis teknologi informasi;
    - 2) mengumpulkan, memverifikasi, mengelompokkan, menyimpan data dan dokumentasi (foto dan video);
    - 3) menyusun konsep pelaporan untuk pimpinan Kementerian PUPR; dan
    - 4) menyelenggarakan komunikasi publik.
  - c. Tim Koordinasi Transportasi membantu Ketua Satuan Tugas Pelaksana dalam:
    - 1) mengoordinasikan penyelenggaraan transportasi operasional satgas dan pimpinan Kementerian PUPR; dan
    - 2) mengoordinasikan penyelenggaraan transportasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dengan pihak terkait.
  - d. Tim Operasional Kesekretariatan membantu Ketua Satuan Tugas Pelaksana dalam:

- 1) mempersiapkan rapat, mendokumentasikan, dan mendistribusikan hasil rapat;
  - 2) menyelenggarakan administrasi dan Sarana Prasarana Posko Satuan Tugas; dan
  - 3) menyelenggarakan tugas kesekretariatan lainnya yang ditugaskan oleh Ketua Satuan Tugas Pelaksana.
4. Tim Pelaksana:
- a. Tim Bidang Sumber Daya Air memiliki tugas sebagai berikut:
    - 1) melaksanakan identifikasi, pendataan kerusakan infrastruktur sumber daya air serta melaksanakan pemulihan infrastruktur sumber daya air;
    - 2) melaksanakan dukungan keterpaduan perencanaan dan perbaikan infrastruktur sumber daya air;
    - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi yang berbasis teknologi terhadap kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
    - 4) melakukan kegiatan dokumentasi, termasuk penyediaan foto dan video proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air; dan
    - 5) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air dalam rangka penanggulangan bencana secara berkala maupun insidental.
  - b. Tim Bidang Bina Marga memiliki tugas sebagai berikut:
    - 1) melaksanakan identifikasi, pendataan kerusakan infrastruktur bina marga serta melaksanakan pemulihan infrastruktur bina marga;
    - 2) melaksanakan dukungan keterpaduan perencanaan dan perbaikan infrastruktur bina marga;

- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi yang berbasis teknologi terhadap kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pembangunan infrastruktur bina marga;
  - 4) melakukan kegiatan dokumentasi, termasuk penyediaan foto dan video proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur bina marga; dan
  - 5) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bina marga dalam rangka penanggulangan bencana dan secara berkala maupun insidental.
- c. Tim Bidang Cipta Karya memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) melaksanakan identifikasi, pendataan kerusakan infrastruktur permukiman serta melaksanakan pemulihan infrastruktur cipta karya;
  - 2) melaksanakan dukungan keterpaduan perencanaan dan perbaikan infrastruktur permukiman;
  - 3) mengidentifikasi kesiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk namun tidak terbatas pada lahan, izin lingkungan, izin bangunan, dan ketersediaan infrastruktur pendukung lainnya;
  - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi yang berbasis teknologi terhadap kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pembangunan infrastruktur permukiman;
  - 5) melakukan kegiatan dokumentasi, termasuk penyediaan foto dan video proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  - 6) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman dalam rangka penanggulangan bencana secara berkala maupun insidental.
- d. Tim Bidang Perumahan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan identifikasi, pendataan kerusakan infrastruktur perumahan, serta penyediaan infrastruktur perumahan;
- 2) melaksanakan dukungan keterpaduan perencanaan dan perbaikan infrastruktur perumahan;
- 3) mengidentifikasi kesiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perumahan termasuk namun tidak terbatas pada Lahan dan Rencana Aksi Permukiman (LARAP), izin bangunan, serta ketersediaan infrastruktur pendukung lainnya;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi yang berbasis teknologi terhadap kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pembangunan infrastruktur perumahan;
- 5) melakukan kegiatan dokumentasi, termasuk penyediaan foto dan video proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur perumahan; dan
- 6) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perumahan dalam rangka penanggulangan bencana secara berkala maupun insidental.

**KEEMPAT** : Tim Koordinasi Pendampingan Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal dan setiap pelaksanaan tugas pendampingan diterbitkan Surat Tugas oleh Inspektur Jenderal.

**KELIMA** : Pelaksanaan tugas Satgas PPB di Provinsi NTT dan Provinsi NTB berlaku sampai dengan pelaksanaan konstruksi permanen selesai.

**KEENAM** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas PPB di Provinsi NTT dan Provinsi NTB dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas Pelaksana.

**KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PPB di Provinsi NTT dan Provinsi NTB diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDELAPAN** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**KESEMBILAN** : Pada saat keputusan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 314.1/KPTS/SJ/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Jenderal Bina Marga;
6. Direktur Jenderal Cipta Karya;
7. Direktur Jenderal Perumahan;
8. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
9. Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

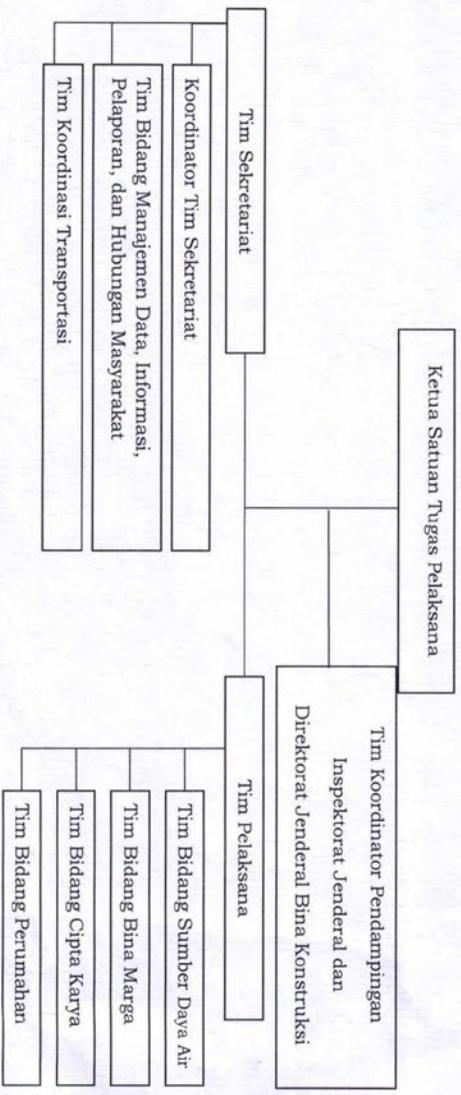


Mohammad Zainal Fatah

NIP. 196610211996031001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR: 351.1 /KPTS/SJ/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PPB DI PROVINSI NTT DAN PROVINSI NTB



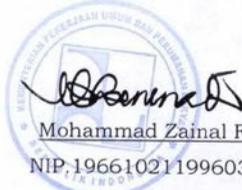
B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATGAS PPB DI PROVINSI NTT DAN PROVINSI NTB

NO	NAMA	UNIT ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ir.Widiarto, Sp1	Inspektorat Jenderal	Ketua Satuan Tugas Pelaksana
TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN INSPEKTORAT JENDERAL DAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI			
1	Bimo Adi N. S.T., M.B.A.	Inspektorat Jenderal	Koordinator
2	Ir. Fauzi Idris, ME.	Inspektorat Jenderal	Anggota
3	Nikmatulloh, S.T., M.T.	Inspektorat Jenderal	Anggota
4	Dr. Ir. Maulidya I. J., M.Sc.	Inspektorat Jenderal	Anggota
5	Dr. Ir. Ign. Wing K, M.Eng.Sc.	Inspektorat Jenderal	Anggota
6	M. Rizal, S.T., Sp-1.	Inspektorat Jenderal	Anggota
7	Dewi Chomistriana S.T., M.Sc.	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
8	Ir. Sumito	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
TIM SEKRETARIAT			
A. KOORDINATOR TIM SEKRETARIAT			
1	Herman Tobo S.T., M.Si.	Balai PPW NTT	Koordinator
B. TIM BIDANG MANAJEMEN DATA, INFORMASI, PELAPORAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT			
1	Nazib Faizal, ST, M.Sc	Pusat Data dan Informasi	Koordinator
2	Krisno Yuwono, ST, MT	Biro Komunikasi Publik	Anggota
3	M. Danial, ST, MIDS	Biro Komunikasi Publik	Anggota

NO	NAMA	UNIT ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
4	Irwan Ahmad Sugiharto	Pusat Data dan Informasi	Anggota
5	Gama Ilmy Hartanto	Pusat Data dan Informasi	Anggota
6	Supram	Pusat Data dan Informasi	Anggota
7	Muhammad Agra Ramadhani	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
<b>C. TIM KOORDINASI TRANSPORTASI</b>			
1	Kresentius BMR Lake, SE, MM.	Balai WS NT II	Koordinator
2	Dirmala, ST	Balai PJN NTT	Anggota
<b>D. TIM OPERASIONAL KESEKRETARIATAN</b>			
1	Luan Tahun, ST, M.Si	Balai PPW NTT	Koordinator
2	Hamidah K. Abubakar, ST, MT	Balai PJN NTT	Anggota
4	Anwar Djaha, ST	Balai PPP NT II	Anggota
<b>TIM PELAKSANA</b>			
<b>A. TIM BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>			
1	Ir. Bob Arthur Lombogia M.Si,	Ditjen Sumber Daya Air	Ketua
2	Dr. Leo Eliasta S.T., M.Sc.,	Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
3	Roy Panagom P., S.T., M.Tech.,	Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
4	Dr. Hendra Ahyadi S.T., M.T.	Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
5	Ir. Agus Sosiawan M.E.	Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
<b>B. TIM BIDANG BINA MARGA</b>			
1	Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng.	Ditjen Bina Marga	Ketua
2	Christoforus, S.T., M.Tech.	Ditjen Bina Marga	Anggota

NO	NAMA	UNIT ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
3	Ir. Herdianto Arifin MT,	Ditjen Bina Marga	Anggota
4	Reiza Setiawan ST, M.Sc.	Ditjen Bina Marga	Anggota
5	Dr. Ir. Muktar Napitupulu M.Sc.	Ditjen Bina Marga	Anggota
C. TIM BIDANG CIPTA KARYA			
1	Ir. Johannes Wahyu K. MUM,	Ditjen Cipta Karya	Ketua
2	Kusumawardhani S.T., M.T.	Ditjen Cipta Karya	Anggota
3	Soelistianing Kusumawati S.T., M.T.	Ditjen Cipta Karya	Anggota
4	Ika Sri Rejeki S.T., M.T.	Ditjen Cipta Karya	Anggota
5	Herman Tobo S.T., M.Si.	Ditjen Cipta Karya	Anggota
D. TIM BIDANG PERUMAHAN			
1	Ir. Yusniewati M.Sc.	Ditjen Perumahan	Ketua
2	Teddy Paul H. Siagian, ST, MT	Ditjen Perumahan	Anggota
3	Julin Fiftina S.T., M.M.	Ditjen Perumahan	Anggota
4	Rini Dyah Mawarty S.T., M.T.,	Ditjen Perumahan	Anggota
5	Yublina Dila Bunga S.T., M.T.	Ditjen Perumahan	Anggota

SEKRETARIS JENDERAL,



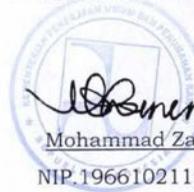
  
 Mohammad Zainal Fatah  
 NIP.196610211996031001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR: 351.1 /KPTS/SJ/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA  
PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR DAN PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT

HONORARIUM SATGAS PPB DI PROVINSI NTT DAN PROVINSI NTB

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	SATUAN
1	2	3	4
1.	Ketua Satuan Tugas Pelaksana	Rp. 650.000,-	OB
2.	Ketua	Rp. 600.000,-	OB
3.	Anggota	Rp. 500.000,-	OB
4.	Tenaga Ahli	Rp. 1.700.000,-	OJ

SEKRETARIS JENDERAL,



Mohammad Zainal Fatah  
NIP. 196610211996031001

# Ucapan Terima Kasih dan Selamat Jalan

kepada



**Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng.**

20 Mei 1964 - 5 Februari 2024

**Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II**  
Periode 2020 - 2023

Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan penghargaan dan terima kasih setingginya kepada almarhum Bapak Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Sc.Eng. atas segala dedikasinya dalam penanganan bencana alam Siklon Tropis Seroja.



## **Dodi Kurniadi, S.T.**

---

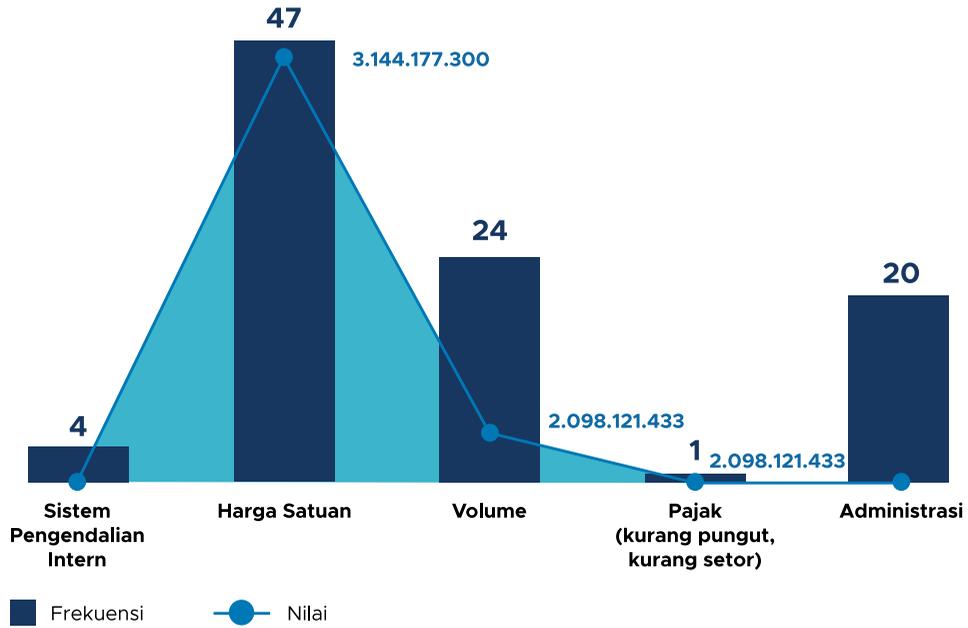
09 Februari 1983 - 12 Juli 2023

**Kepala Satker Penyediaan Perumahan Prov. Nusa Tenggara Timur**  
Periode 2021 - 2023

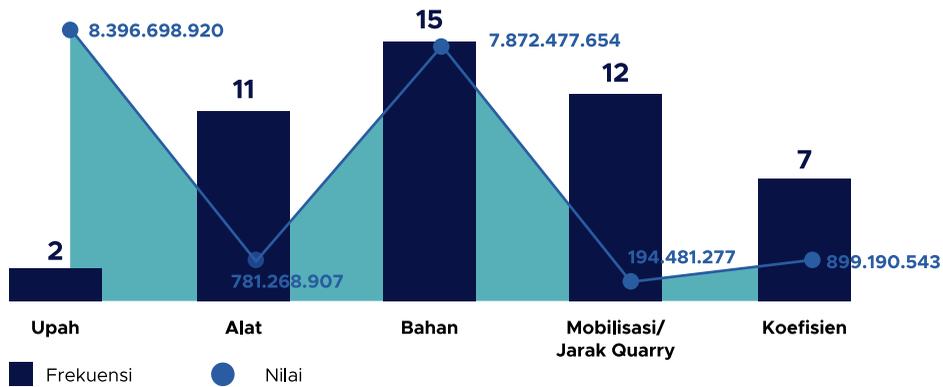
**Kepala Satker Penyediaan Perumahan Prov. Sulawesi Tenggara**  
Tahun 2023

Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan penghargaan dan terima kasih setingginya kepada almarhum Bapak Dodi Kurniadi, ST. atas segala dukungan dan dedikasinya dalam penanganan bencana alam Siklon Tropis Seroja.

# Hasil Audit BPKP



Kode	Jenis Temuan	Frekuensi Temuan		Nilai Temuan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
A	Sistem Pengendalian Intern	4	4,2%	Rp. 0	0,00%
B	Harga Satuan	47	49,0%	Rp.18.144.117.300	89,63%
C	Volume	24	25,0%	Rp.2.098.121.433	10,63%
D	Pajak (kurang pungut, kurang setor)	1	1,0%	Rp.2.112.728	0,001%
E	Administrasi	20	20,8%	Rp.0	0,00%





Kode	Jenis Temuan	Frekuensi Temuan		Nilai Temuan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
A	Sistem Pengendalian Intern	4	4,17%	Rp. 0	0,00%
B	Harga Satuan				
B-1	Upah	2	2,08%	Rp.8.396.698.920	41,48%
B-2	Alat	11	11,46%	Rp.781.268.907	3,86%
B-3	Bahan	15	15,63%	Rp.7.872.477.654	38,89%
B-4	Mobilisasi/Jarak Quarry	12	12,50%	Rp.194.481.277	0,96%
B-5	Koefisien	7	7,29%	Rp.899.190.543	4,44%
C	Volume				
C-1	Kurang Volume	16	16,67%	Rp. 1.648.695.024	8,14%
C-2	Volume pekerjaan belum selesai	1	1,04%	Rp.24.440.423	0,12%
C-3	Volume pekerjaan rusak	4	4,17%	Rp.220.185.217	1,09%
C-4	Biaya langsung & tidak langsung konsultan	3	3,13%	Rp.204.800.770	1,01%
D	Pajak (kurang punut, kurang setor)	1	1,04%	Rp.2.112.728	0,01%
E	Administrasi	20	20,83%	Rp.0	0,00%
TOTAL		96		Rp.20.244.351.461	

## KEGIATAN RELOKASI PERMUKIMAN



**RELOKASI  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN  
LEMBATA**

**DS. WAISESA  
KAB. LEMBATA**

**Pembangunan 173 Unit RISHA  
Progres 100%**

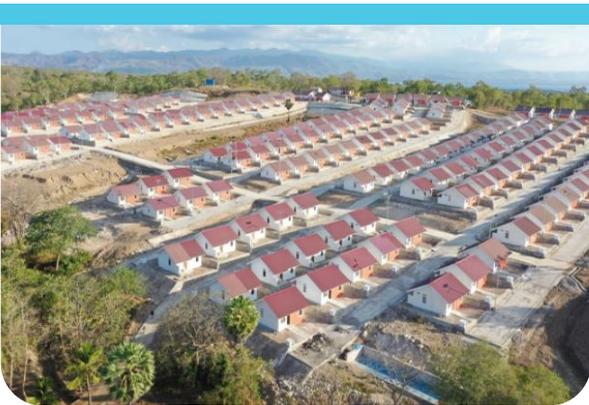


**DS. TANAH MERAH  
KAB. LEMBATA**



**Pembangunan 294 Unit RISHA  
Progres 100%**

**DS. PODU  
KAB. LEMBATA**



**Pembangunan 233 Unit RISHA**  
Progres 100%

## Dokumentasi Serah Terima Relokasi Permukiman Kab. Lembata

Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Waesesa



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Waesesa



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Waesesa



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Waesesa



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Waesesa



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Waesesa



**Ds. Waesesa (233 Unit)**

**Ds. Tanah Merah (294 Unit)**

## Dokumentasi Serah Terima Relokasi Permukiman Kab. Lembata

Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Podu



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Podu



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Podu



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Podu



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Podu



Ds. Podu (233 Unit)



**DS. OYANGBARANG**  
KAB. FLORES TIMUR

**Pembangunan 50 Unit RISHA**  
Progres 100%



**DS. SAOSINA**  
KAB. FLORES TIMUR

**Pembangunan 195 Unit RISHA**  
Progres 100%



**DS. NELELAMADIKE  
KAB. FLORES TIMUR**

**Pembangunan 55 Unit RISHA  
Progres 100%**



## Dokumentasi Serah Terima Relokasi Permukiman Adonara Kab. Flotim

Kegiatan Serah Terima Kunci  
Ds Oyangbarang



Malam Pertama Penghunian  
Ds Oyangbarang



Penandatanganan Serah Terima Kunci  
Ds Oyangbarang



Kegiatan Serah Terima Kunci  
Ds Oyangbarang



**Ds. Oyangbarang (50 Unit)**

# Dokumentasi Serah Terima Relokasi Permukiman Adonara Kab. Flotim



**Ds. Nelelamadike (55 Unit)**

**Ds. Saosina (195 Unit)**

**KEL. MANULAI II  
KOTA KUPANG**

**Pembangunan 173 Unit RISHA Terdiri dari :**

1. Bidang 1 (66 Unit)
2. Bidang 2 (52 Unit)
3. Bidang 3 (45 Unit)
4. Bidang 4 (10 Unit)



## Dokumentasi Serah Terima Relokasi Permukiman Kota Kupang

Kegiatan Serah Terima Kunci Kel. Manulai II



Kegiatan Serah Terima Kunci Kel. Manulai II



Kegiatan Serah Terima Kunci Kel. Manulai II



Kegiatan Serah Terima Kunci Kel. Manulai II



Kegiatan Serah Terima Kunci Kel. Manulai II

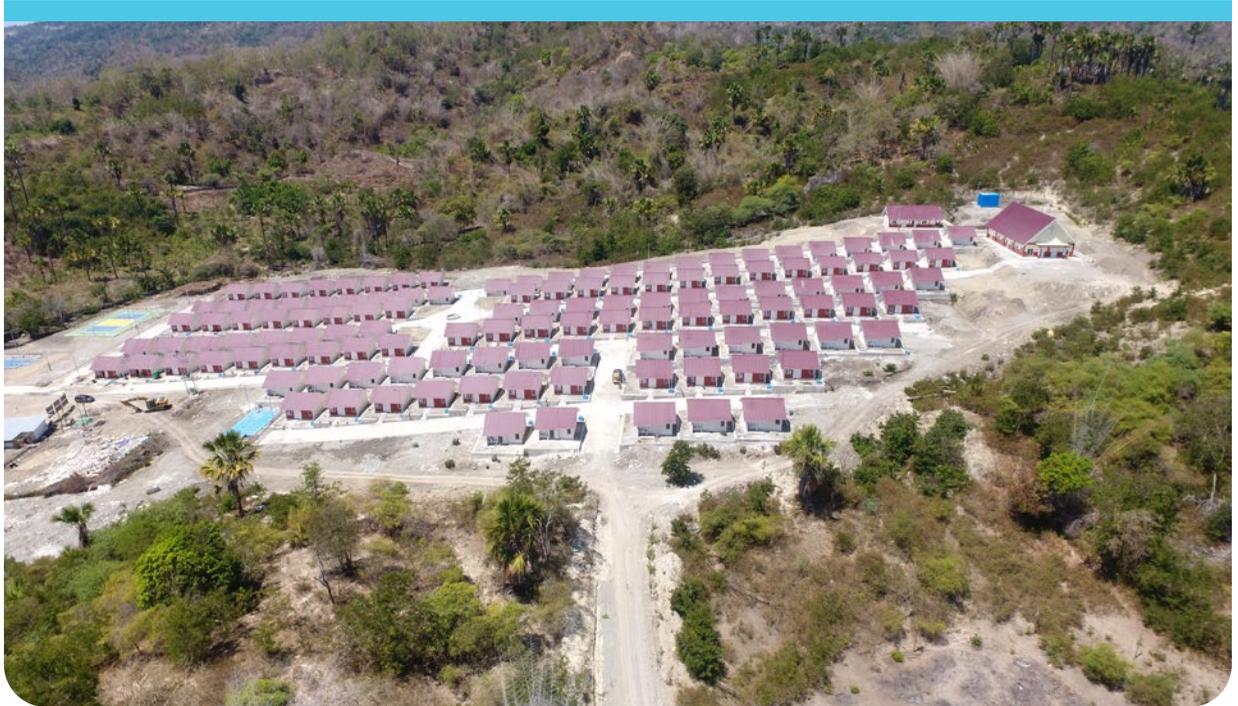


**DS. BOKONG**  
KAB. KUPANG

**Pembangunan 45 Unit RISHA**  
Progres 100%



**DS. SAUKIBE  
KAB. KUPANG**



**Pembangunan 124 Unit RISHA  
Progres 100%**

## Dokumentasi Serah Terima Relokasi Permukiman Kab. Kupang

Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Bokong



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Bokong



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Bokong



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Bokong



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Bokong



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Bokong



**DS. TANARAING**  
**KAB. SUMBA TIMUR**



**Pembangunan 58 Unit RISHA**  
Progres 100%

**DS. WATUHADANG  
KAB. SUMBA TIMUR**



**Pembangunan 31 Unit RISHA  
Progres 100%**

**DS. NGGONGI**  
**KAB. SUMBA TIMUR**



**Pembangunan 50 Unit RISHA**  
**Progres 100%**

**DS. KATIKUTANA**  
KAB. SUMBA TIMUR

**Pembangunan 55 Unit RISHA**  
Progres 100%



## Dokumentasi Serah Terima Relokasi Permukiman Kab. Sumba Timur

Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Ngonggi



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Katikutana



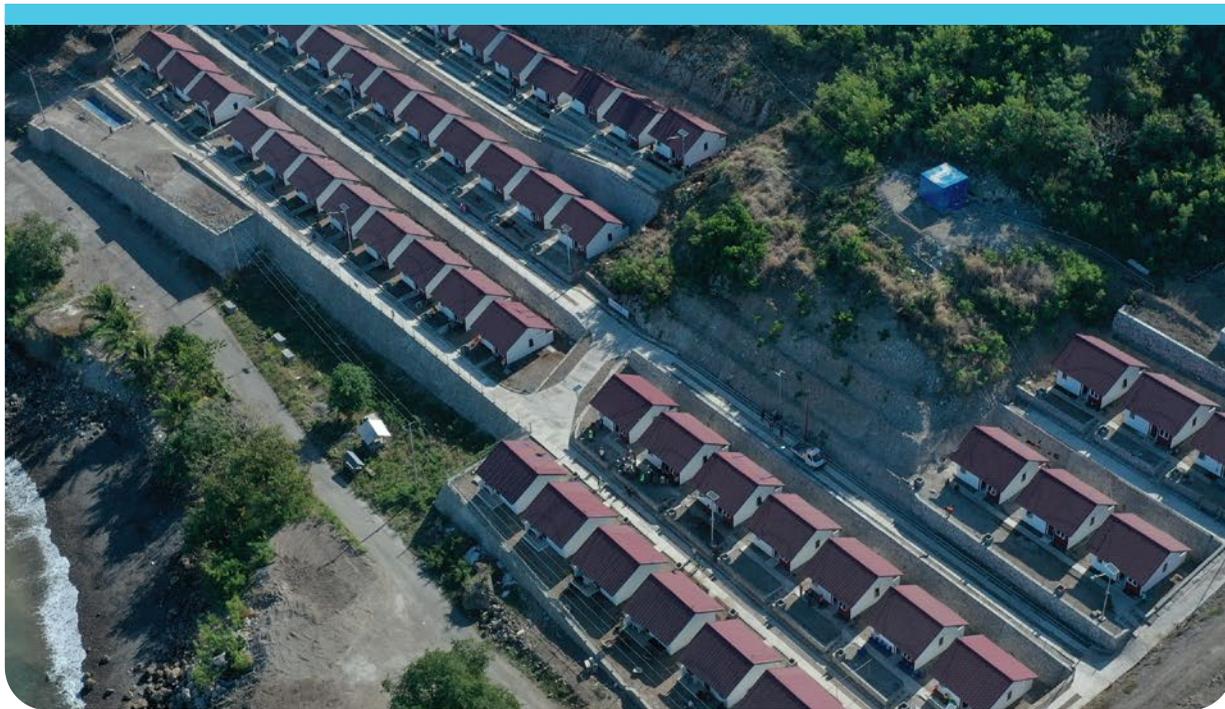
Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Watuhadang



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Tanaraing



**DS. NULLE**  
**KAB. ALOR**



**Pembangunan 52 Unit RISHA**  
Progres 100%

**DS. BUNGABALI**  
KAB. ALOR

**Pembangunan 170 Unit RISHA**  
Progres 100%



**DS. KALEB**  
KAB. ALOR



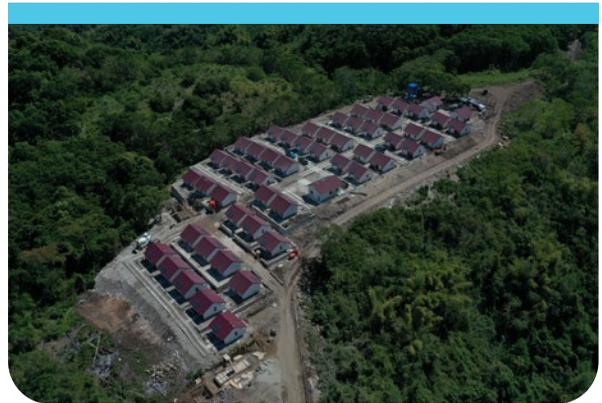
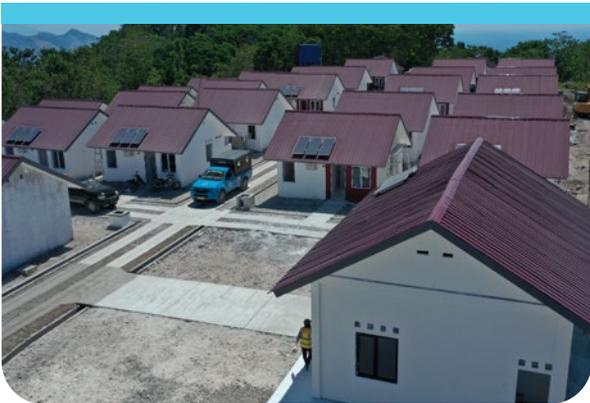
**Pembangunan 61 Unit RISHA**  
Progres 100%

**DS. TAMAKH**  
KAB. ALOR



**Pembangunan 50 Unit RISHA**  
Progres 100%

**DS. LALAFANG**  
KAB. ALOR



**Pembangunan 53 Unit RISHA**  
Progres 100%

## Dokumentasi Serah Terima Relokasi Permukiman Kab. Alor

Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Nulle



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Bungabali



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Lalafang



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Tamakh

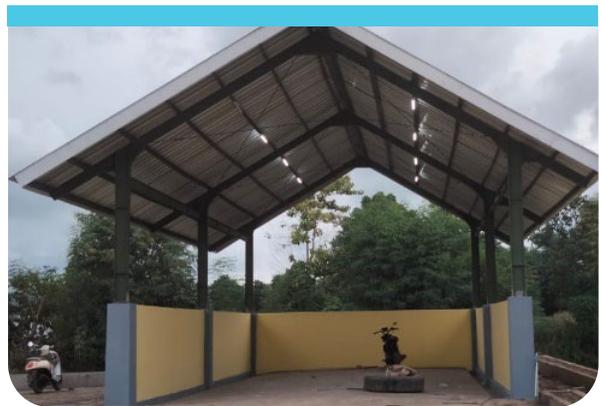


Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Kaleb



**DS. TAMBE**  
KAB. BIMA

**Pembangunan 185 Unit RISHA**  
PT Hutama Karya | Progres 100%



Dokumentasi Penanganan

**DS. DAHA**  
KAB. DOMPU

**Pembangunan 107 Unit RISHA**  
PT Utama Karya | Progres 100%



## Dokumentasi Serah Terima Kunci & Penghunian Prov. NTB

Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Tambe



Kegiatan Serah Terima Kunci Ds Daha



Suasana Malam di Ds Tambe



Aktivitas Warga di Ds Daha



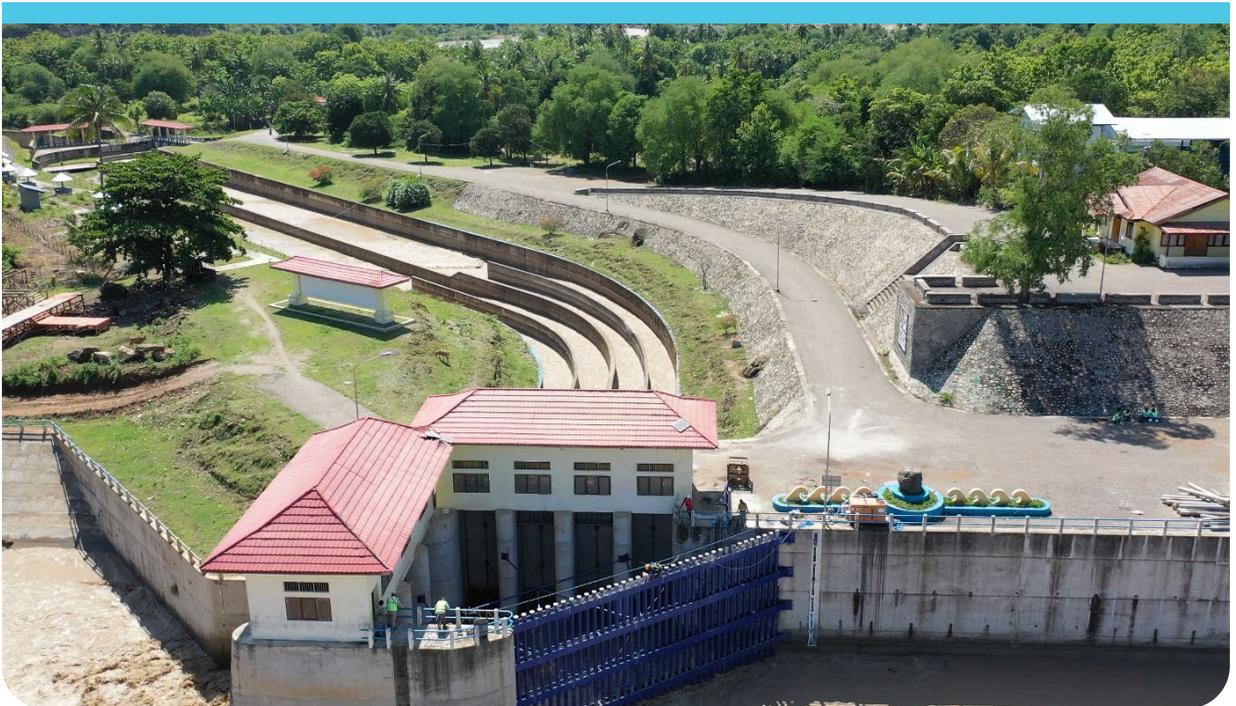
Aktivitas Warga di Ds Tambe



Area Playground Ds Daha



## SUMBER DAYA AIR





## BENDUNG BENANAIN KAB. MALAKA

1. Saluran Induk  $\pm$  250 m
2. Tanggul Saluran & Jalan Inspeksi  $\pm$  250 m
3. saluran sekunder & tanggul  $\pm$  2.750 m
4. Pintu Pembilas Kantong Lumpur 2 Unit
5. Mekanikal Elektrikal Pintu Intake 2 Unit
6. Trashrack Intake 1 Unit
7. Perbaikan Inlet & Outlet Siphon

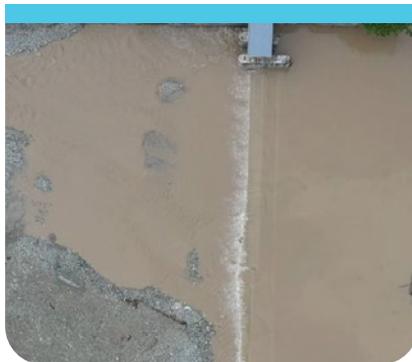
**PT. Wijaya Karya**  
Progres 100%

## BENDUNG HAEKESAK KAB. BELU

**PT. Wijaya Karya**  
Progres 100%

Lokasi berada di Sungai Perbatasan Indonesia – Timor Leste

1. Bendung 1 Buah
2. Saluran Sekunder ± 625 m Perbaikan Inlet & Outlet Siphon



## BENDUNG MENA KAB. TTU



**Pembangunan Bendung 1 Buah ( $\pm$  270 m)**  
Progres 100%

**KAB. SUMBA TIMUR**

**PT Nindya Karya**  
Progres 100%

**BENDUNG KAMBANIRU**

1. Penambahan Lebar Bendung  $\pm 40$  m
2. Tanggul Kanan  $\pm 70$  m
3. Saluran Primer  $\pm 2000$  m
4. Pengaman Tebing Sungai  $\pm 400$  m
5. Saluran Sekunder  $\pm 2.500$  m

**BENDUNG BAING**

1. Pembangunan Tanggul Sayap Kiri
2. Pembangunan Dinding Bronjong Pengaman Saluran



Normalisasi Sungai dan Pembangunan Tanggul Pengaman Bandara Waingapu + 4.100 m (Kel. Mauliru 1000 m, Kel. Labanapu 1.500 m, dan Kel. Kambaniru 1.600 m).

SUNGAI KAMBANIRU



SUNGAI KAWANGU

Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing Sungai Pengaman Jalan  $\pm$  1.500 m (Ds. Kawangu 700 m dan Ds Kambatana 800 m).



SUNGAI PAYETI

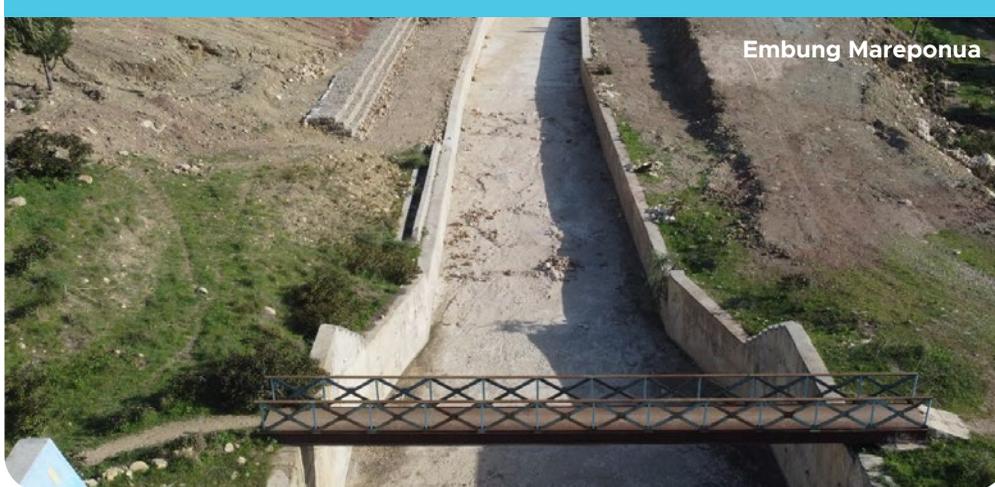
Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing Sungai Pengaman Permukiman  $\pm$  4.100 m (Ds. Kamalapati 1.200 m, Ds. Wangga 1.300 m dan Ds Kambajawa 1.600 m).

**KAB. SABU RAIJUA**

**PT Nindya Karya**  
Progres 100%

**EMBUNG MAPUHABA**

1. Perbaikan spillway  $\pm$  25 m
2. Pemasangan pipa irigasi 24".

**EMBUNG MAREPONUA**

1. Perbaikan Spillway  $\pm$  50 m
2. Perbaikan Saluran Pelimpah  $\pm$  135 m
3. Perbaikan Tanggul Saluran Pelimpah  $\pm$  25 m

**KAB. ALOR**

## **EMBUNG WAISIKA**

Pembangunan Bendung 1 Buah

**PT Pembangunan Perumahan**

Progres 100%



## **BENDUNG LEMBUR**

Pembangunan Bendung 1 Buah

**KAB. BIMA**

## SUNGAI WORO

Pasangan bronjong dan perbaikan pasangan dinding sungai ± 1.796 m

**PT. Hutama Karya**  
Progres 100%



## SUNGAI PALIBELO

Pasangan bronjong dan perbaikan pasangan dinding sungai ± 1.584 m

**KAB. DOMPU**

## BENDUNG KALO

perbaikan pasangan dinding sungai  
± 160 m

**PT. Hutama Karya**

Progres 100%



## SUNGAI MARADA

Pasangan bronjong dan perbaikan pasangan  
dinding sungai ± 227 m

KOTA BIMA

PT. Hutama Karya  
Progres 100%



Pasangan bronjong dan perbaikan pasangan dinding sungai ± 30 m

Sungai Lewirato



Sungai Jatibaru

Pasangan bronjong dan perbaikan pasangan dinding sungai ± 235 m



Sungai Dodu

Pasangan bronjong dan perbaikan pasangan dinding sungai ± 159 m

PROYEK TANGGAP DARURAT BANDE BINGA KAB. DOMPU - KOTA BINGA - KAB. BINGA TH. 2021	
LOKASI: Sungai dodu KAB. BINGA	TANGGAL: 28-12-21
STA :	

## BINA MARGA



## JEMBATAN BENANAIN KAB. MALAKA

Pembangunan Kembali Jembatan Benanain 3 Bentang (125 m). Semula : Bentang 2 (60 m), Bentang 3 (35 m), Bentang 4 (30 m) Menjadi : 2 Bentang (2 x 60 m) dan 1 Bentang 5 m.

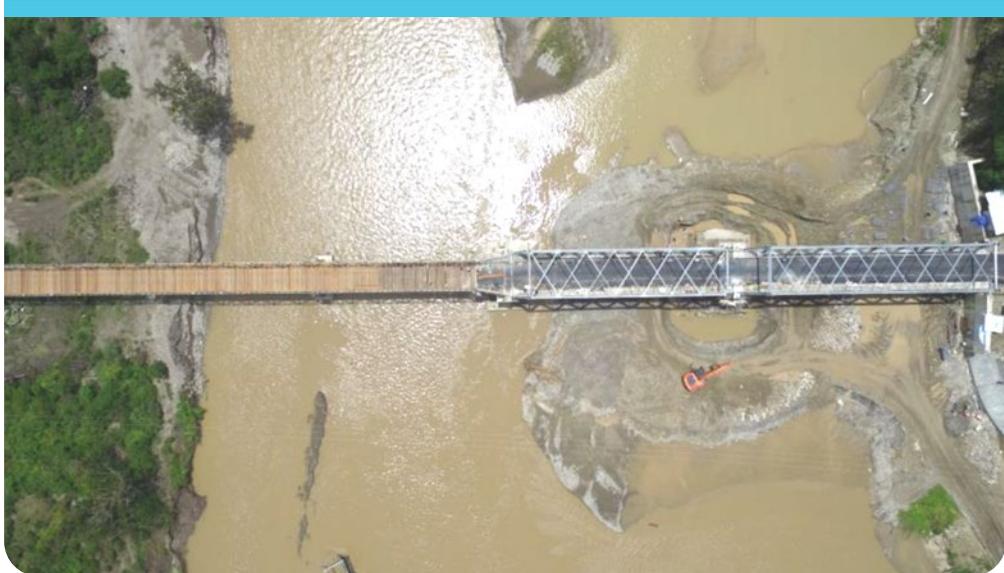
**PT. Wijaya Karya**  
Progres 100%



**JEMBATAN TERMANU**  
KAB. KUPANG

Pembangunan Jembatan Termanu  
3 Bentang (+ 100 m).  
Total Panjang Jembatan + 190 m

**PT Waskita Karya**  
Progres 100%



## 14 JEMBATAN MENUJU TERMANU KAB. KUPANG

Jembatan Pokiaw



Jembatan Baimel



Jembatan Fatutenu



## 14 JEMBATAN MENUJU TERMANU KAB. KUPANG

Jembatan Sumlili



Jembatan Oelobe



Jembatan Siumate Kecil 1



## 14 JEMBATAN MENUJU TERMANU KAB. KUPANG



## 14 JEMBATAN MENUJU TERMANU KAB. KUPANG

Jembatan Siumate Besar



Jembatan Siumate Kecil 2



Jembatan Nombatas



## 14 JEMBATAN MENUJU TERMANU KAB. KUPANG

Jembatan Litsusu



Jembatan Manubelon



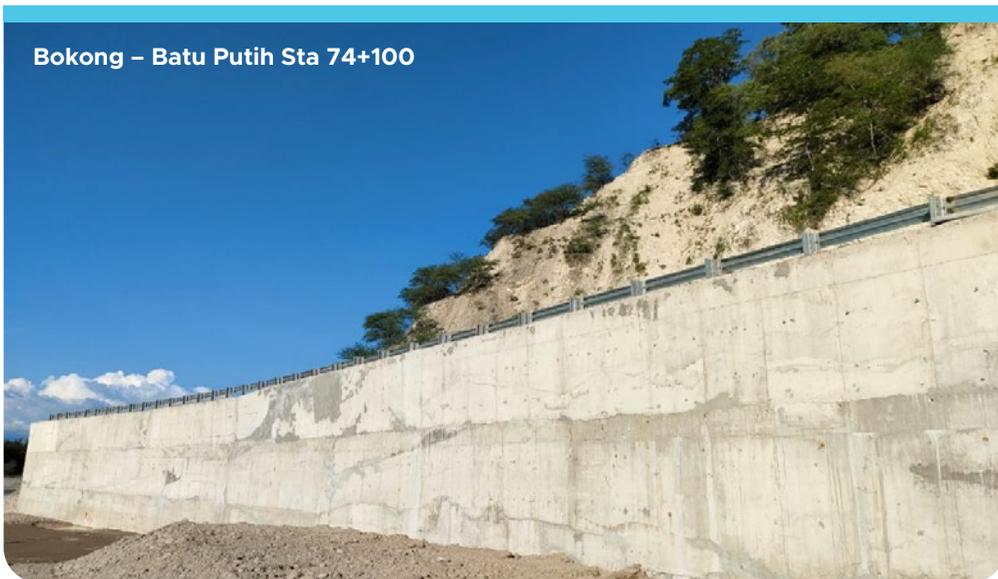
Jembatan Siumate Bisnain



**KAB. KUPANG**



Bokong – Batu Putih Sta 70+325



Bokong – Batu Putih Sta 74+100

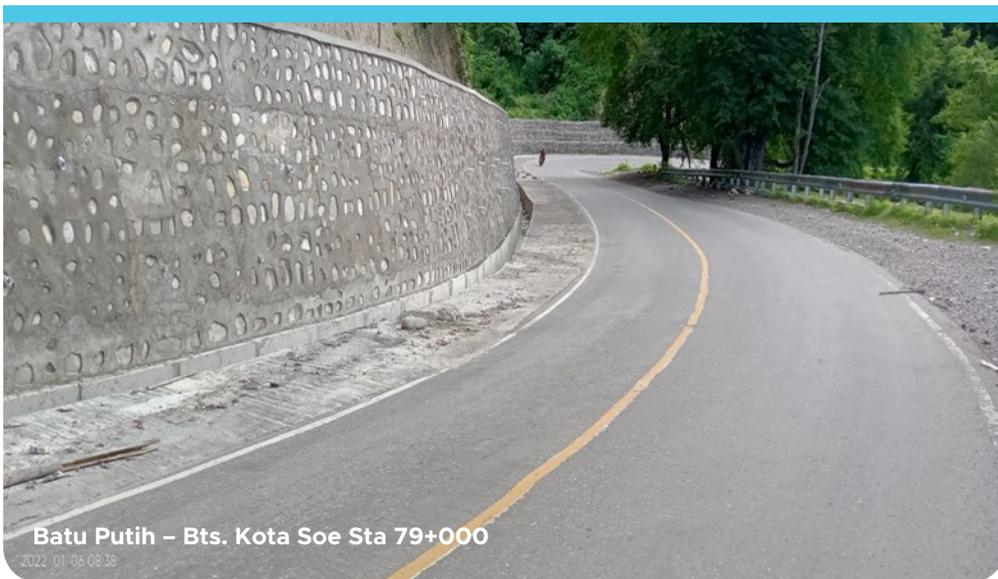
Perbaikan akses jalan  
terdampak longsor

**PT Brantas Abipraya**  
Progres 100%

**KAB. TTS**



Batu Putih – Bts. Kota Soe Sta 78+500



Batu Putih – Bts. Kota Soe Sta 79+000

Perbaikan akses jalan  
terdampak longsor

**PT Brantas Abipraya**  
Progres 100%

## KAB. SUMBA TIMUR



Perbaikan akses jalan terdampak bencana

**PT Nindya Karya**  
Progres 100%

**KAB. ALOR**

**PT Pembangunan Perumahan**  
Progres 100%

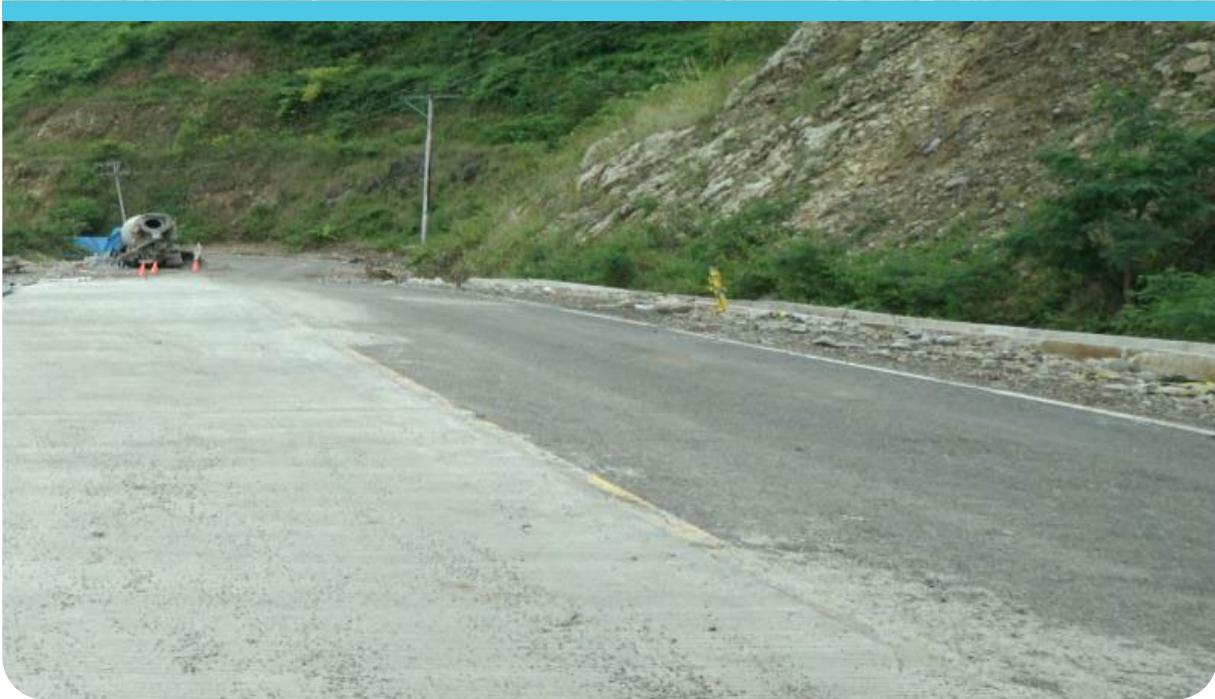


Perbaikan akses jalan  
terdampak bencana

**PT Pembangunan Perumahan**  
Progres 100%

**PENANGANAN LONGSORAN KM 85+300 sd 85+600**  
KAB. ALOR





## PT Pembangunan Perumahan Progres 100%

Pekerjaan yang dilakukan :

1. Saluran U-ditch
2. GeoMat
3. Rigid KM 85+600
4. Guard Rail

# CIPTA KARYA



## SPAM WEUTU SIRANI KAB. BELU

Perbaikan SPAM Weutu Sirani:

1. Pipa HDPE Ø200mm
2. Septic Tank Rumah OP
3. Rumah OP dan Rumah Pompa
4. Jalan Akses
5. Dinding Penahan Mata Air

**PT. Wijaya Karya**  
Progres 100%



**SPAM EBAN TTU**  
KAB. TTU

**PT Waskita Karya**  
Progres 100%



Perbaikan SPAM Weutu Sirani:

1. Pekerjaan Trust Block
2. Pekerjaan Support Pipa
3. Pekerjaan Jembatan WF
4. Pekerjaan Collecting Pipa

## GEDUNG POLDA NTT KOTA KUPANG



- Perbaikan Gedung Polda NTT:
1. Kantor Mako Satbrimob Polda NTT
  2. Klinik Teratai BM
  3. Aula Satbrimob
  4. Barak Bujang
  5. Pagar Asrama

**PT Brantas Abipraya**  
Progres 100%

## BANGUNAN TNI KOTA KUPANG

**PT Brantas Abipraya**  
Progres 100%



### Perbaikan Gedung Bangunan TNI :

1. Kantor 161 Wirasakti TNI
2. Kantor Makorem
3. Kantor Makodim 1604
4. Kantor Denpom
5. Rumah Dinas Pamen
6. Asrama Cak Mandala
7. TK Kartika VIII-7
8. Asrama Tentara Kuanino
9. Yonif 743

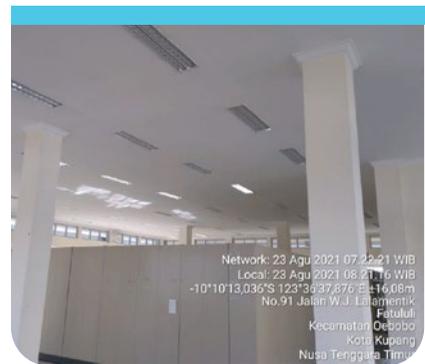
**KANTOR BPK  
KOTA KUPANG**

Perbaikan Bangunan Gedung BPK :

1. Gd BPK Ruang Arsip
2. Gd Utama BPK RI
3. Pagar BPK RI

**PT Brantas Abipraya**

Progres 100%



## PERBAIKAN GEREJA KOTA KUPANG



Perbaikan Bangunan Gereja :

1. Gereja Rock
2. Gereja Petrus Paskuan
3. Gereja Katedral
4. Kantor GMIT Sinode

**PT Brantas Abipraya**  
Progres 100%

## GEDUNG LAPAS KEMENKUMHAM KOTA KUPANG



### PT Brantas Abipraya

Progres 100%

Perbaikan Bangunan Gedung Lapas  
Kemenkumham :

1. Kantor Kanwil
2. Lapas Kelas II A Kupang
3. LPK Anak Kupang
4. Lapas Perempuan Kelas II B Kupang
5. Balai Masyarakat Kelas II Kupang

## KANTOR GUBERNUR JL ELTARI KUPANG KOTA KUPANG



Perbaikan Bangunan Gedung Kantor Jl  
Eltari :

1. BAPELITBANGDA
2. Sekretariat Gedung DPRD
3. Gedung Kelimutu Sekretariat dan  
Gedung DPRD
4. Garasi DPRD

**PT Brantas Abipraya**  
Progres 100%



**Perbaikan Bangunan Gedung Universitas  
Nusa Cendana :**

1. Gd Rumah Sakit Undana
2. Gd Rektorat
3. Gd Fakultas Pertanian
4. Gd Fakultas Peternakan
5. Gd Klinik Hewan
6. Gd Micro Teaching FKIP 2
7. Gd PGSD FKIP 3
8. Gd PPKN FKIP 1
9. Gd Fakultas Ekonomi Bisnis
10. Gd Laboratorium Bio Sains

## KOMPLEK BANGUNAN GEDUNG NEGARA KAB. SABU RAIJUA



Perbaikan Komplek Bangunan Gedung Negara :

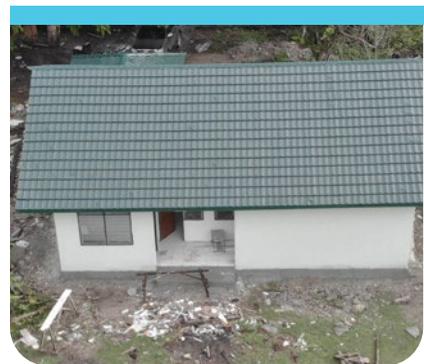
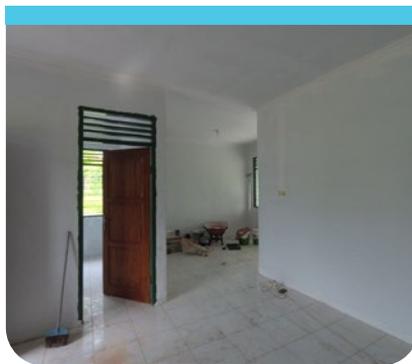
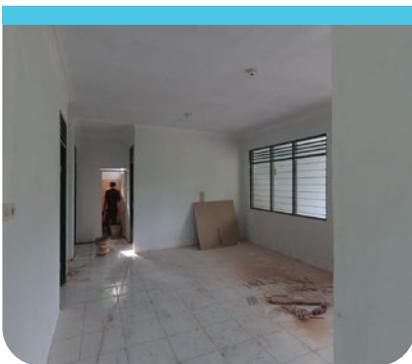
1. Kantor Bupati Sabu Raijua
2. Kantor SKPD PUPR dan PRKP
3. Kantor SKPDLH, BPBD, dan DKP
4. Kantor SKPD Dinsos dan Nakertrans
5. Dinas PPO
6. Kantor PU Lama
7. Kantor Pertanian dan Pangan
8. Sekretariat DPRD
9. Rumah Jabatan Bupati
10. Rumah Jabatan Wakil Bupati

**BANGUNAN KODIM 1601**  
KAB. SUMBA TIMUR

**PT. Nindya Karya**  
Progres 100%

Perbaikan KODIM 1601 :

1. Rumah Dinas KODIM 1601/ST No. 31-33
2. Rumah Dinas KODIM 1601/ST No. 34-35
3. Makoramil 1601-06 Karera
4. Aula Makoramil 1601-06 Karera
5. Pagar Makoramil 1601-06 Karera
6. Posramil 1601-03 Pahunga Lodu



**BANGUNAN SEKOLAH SD WARDABI**  
KAB. ALOR



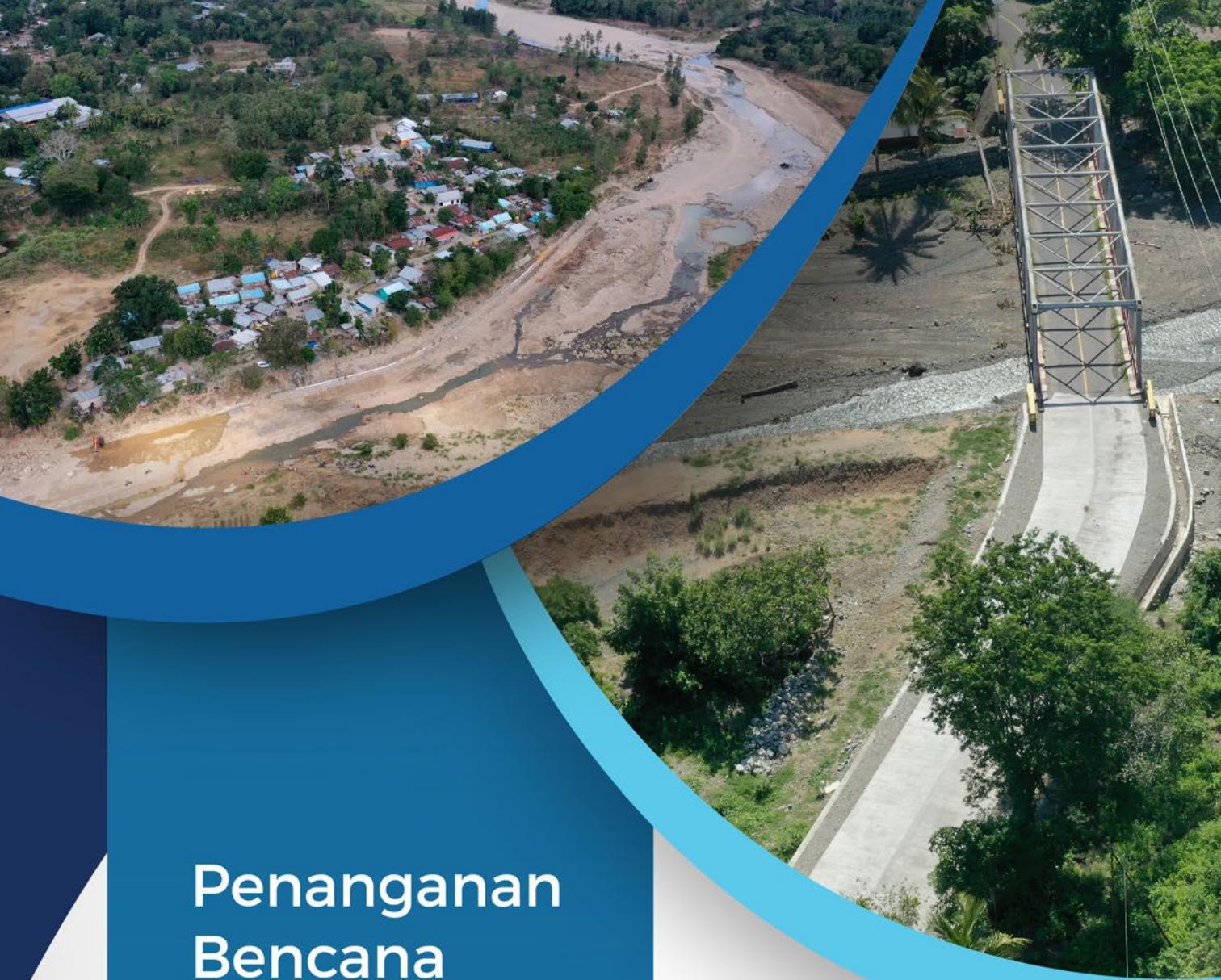


## PT. Pembangunan Perumahan

### Progres 100%

Perbaikan Bangunan Gedung  
Kantor Jl Eltari :

1. Ruang Kelas 2 Unit  
(daya tampung 66 Siswa)
2. Kantor
3. Perpustakaan
4. Toilet & Tempat Cuci Tangan
5. Lapangan
6. Pagar dan Gapura
7. Jalan Masuk
8. Tower dan Bak Air



Penanganan  
Bencana  
**SEROJA**  
NTT dan NTB  
**2021**

Bangkitlah,  
Nusa Tenggara!